



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2005 - 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang maju dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana

kerja SKPD yang bersifat indikatif.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan .
14. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 4

- (1) RPJPD 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPDP.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV : Visi Dan Misi Daerah

BAB V : Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan RPJPD Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SYAIFUL JANNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017
NOMOR : 6

NOREG PERDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT : (6/129/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2005-2025

I. UMUM

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai Kabupaten Kepulauan Mentawai dan strategi untuk mencapainya. RPJPD disusun mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJMD dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJPD Nasional, yaitu tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 6

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 6 Tahun 2017
Tanggal : 18 Oktober 2017
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
1.5 Maksud dan Tujuan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.3 Aspek Pelayanan Umum	35
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	55
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	58
3.2 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai	78
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	
4.1 Visi	87
4.2 Misi	88
4.3 Tujuan dan Sasaran	91
BAB V ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH	
5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	94
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang	99
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	12
Tabel 2.2	Kelerengan Tanah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	13
Tabel 2.3	Nama-nama Sungai di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	14
Tabel 2.4	Desa – Desa Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai	17
Tabel 2.5	Wilayah Abrasi Pantai Terparah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	17
Tabel 2.6	Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	18
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	19
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016.....	21
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	23
Tabel 2.11	Nilai Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2014.....	25
Tabel 2.12	Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	28
Tabel 2.13	Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	30
Tabel 2.14	Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	32
Tabel 2.15	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen) 2012-2015.....	33
Tabel 2.16	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	34
Tabel 2.17	Perkembangan Seni, Budaya, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	35
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	37
Tabel 2.19	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	38

Tabel 2.20	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	39
Tabel 2.21	Jumlah Peserta UN dan yang Lulus UN Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	40
Tabel 2.22	Jumlah Guru dengan Kualifikasi Akademik S1/D-IV Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	40
Tabel 2.23	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	41
Tabel 2.24	Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	42
Tabel 2.25	Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	43
Tabel 2.26	Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	43
Tabel 2.27	Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	44
Tabel 2.28	Kondisi Jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	44
Tabel 2.29	Jumlah Pelabuhan/Dermaga dan Bandara, 2012-2016	45
Tabel 2.30	Kondisi Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	46
Tabel 2.31	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah, 2012-2016.....	50
Tabel 2.32	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Keladi, 2012-2016.....	51
Tabel 2.33	Perkembangan Hasil Komoditi Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	52
Tabel 2.34	Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Unggas (ekor), 2012-2016.....	52
Tabel 2.35	Jumlah Nelayan dan Produksi Ikan Laut Kabupaten kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	52
Tabel 2.36	Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung, 2012-2016.....	53
Tabel 2.37	Banyaknya dan jenis Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	54
Tabel 2.38	Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	54
Tabel 3.1	Identifikasi Isu-Isu Strategis.....	79
Tabel 3.2	Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	84
Tabel 4.1	Perumusan Visi.....	87

Tabel 4.2	Penjelasan Visi.....	88
Tabel 4.3	Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	89
Tabel 4.4	Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Misi Jangka Panjang Nasional Dan Provinsi Sumatera Barat.....	89
Tabel 5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan.....	94
Tabel 5.2	Prioritas Pembangunan Dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	100
Tabel 5.3	Tahapan dan Prioritas Kebijakan Pembangunan.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Bagan Alir Penyusunan RPJPD Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	6
Gambar	1.2	Kedudukan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	9
Gambar	2.1	Peta Mitigasi Bencana.....	17
Gambar	2.2	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2011-2014.....	26
Gambar	2.3	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016.....	26
Gambar	2.4	Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016.....	27
Gambar	2.5	IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016.....	29

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2005-2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJPD seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam kampanye perodesasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJPD pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan akan menunjukkan arah pembangunan yang jelas, sistematis dan terarah. Muatan RPJPD akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, 5 tahunan) maupun Perencanaan Jangka Pendek (RKPD, 1 tahun).

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan dimasa 20 (dua puluh tahun) mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan tidak ada landasan pijakan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Salah satu cita-cita pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah tidak lain untuk mempercepat proses pembangunan, mengurangi ketimpangan pembangunan dengan daerah lain, menghasilkan kemajuan di segala bidang serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan cepat kepada masyarakat. Ini tidak lain tentunya untuk mencapai peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan utama yang ingin diselesaikan adalah bagaimana mengkondisikan agar capaian pembangunan yang berkualitas, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas, serta pembangunan ekonomi yang inklusif, terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat Mentawai. Untuk itu perencanaan jangka panjang adalah instrumen yang digunakan sebagai upaya pembentukan masa depan Mentawai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah suatu konsep yang jelas tentang arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dalam RPJMD selama 4 periode untuk di implementasikan dengan dukungan sumber daya manusia, dana, infrastruktur, organisasi dan manajemen yang memadai untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Dimana keberhasilannya dapat diukur dengan parameter-parameter yang jelas dari waktu ke waktu. Konsep pembangunan yang demikian adalah sesuatu yang di usahakan dan disempurnakan secara terus-menerus dengan belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman daerah lain.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan yang besar, dengan luas wilayah sebesar 6.011,35 Km² dan memiliki garis pantai sepanjang 1.402 Km. Memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat menjadi modal pembangunan baik di darat maupun di laut. Sebagai Kabupaten Baru, Kepulauan Mentawai tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju, menjadi daerah yang besar dan maju adalah cita-cita Mentawai bersama. Cita-cita untuk menjadikan daerah ini menjadi daerah yang sejahtera, mandiri, dan maju, tetapi tantangan dari ujian dari berbagai aspek tidaklah mudah. Penduduk terus bertambah, energi dan air akan menjadi langka yang harus diamankan, dan dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan.

Dalam kurun waktu 2005-2025, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat mentawai yang sejahtera.

Pertama, capaian laju perekonomian sekitar 4% selama periode 1999-2004, belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Mentawai yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Mentawai yang tertinggal dan miskin yang tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 4% per tahun. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6.5 % per tahun dalam 20 tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Mentawai. Hal ini mempercepat penurunan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan yang saat ini masih tinggi yakni 16 %. Pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif dan tepat kepada kelompok yang terpinggirkan. Untuk itu perlu program afirmatif secara konsisten, kontinyu dengan sasaran yang terarah, jelas dan tepat.

Ketiga, Untuk mengurangi kesenjangan antar pulau dan wilayah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Mentawai, terutama wilayah wilayah pantai barat Siberut, dan Pagai Selatan. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalam nya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati.

Keempat, Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil dan menengah, diharapkan juga tumbuh dan berkembang dengan sehat agar meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja, pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup, mengingat daya dukung Kepulauan Mentawai yang sangat kecil dan rentan, perlu pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan. Karena itu perlu meninjau kembali RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya menjadi proporsional dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting dilihat dari berbagai dimensi. Jelas diperlukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk membuka keterisoliran daerah, meningkatkan produktivitas daya saing daerah.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

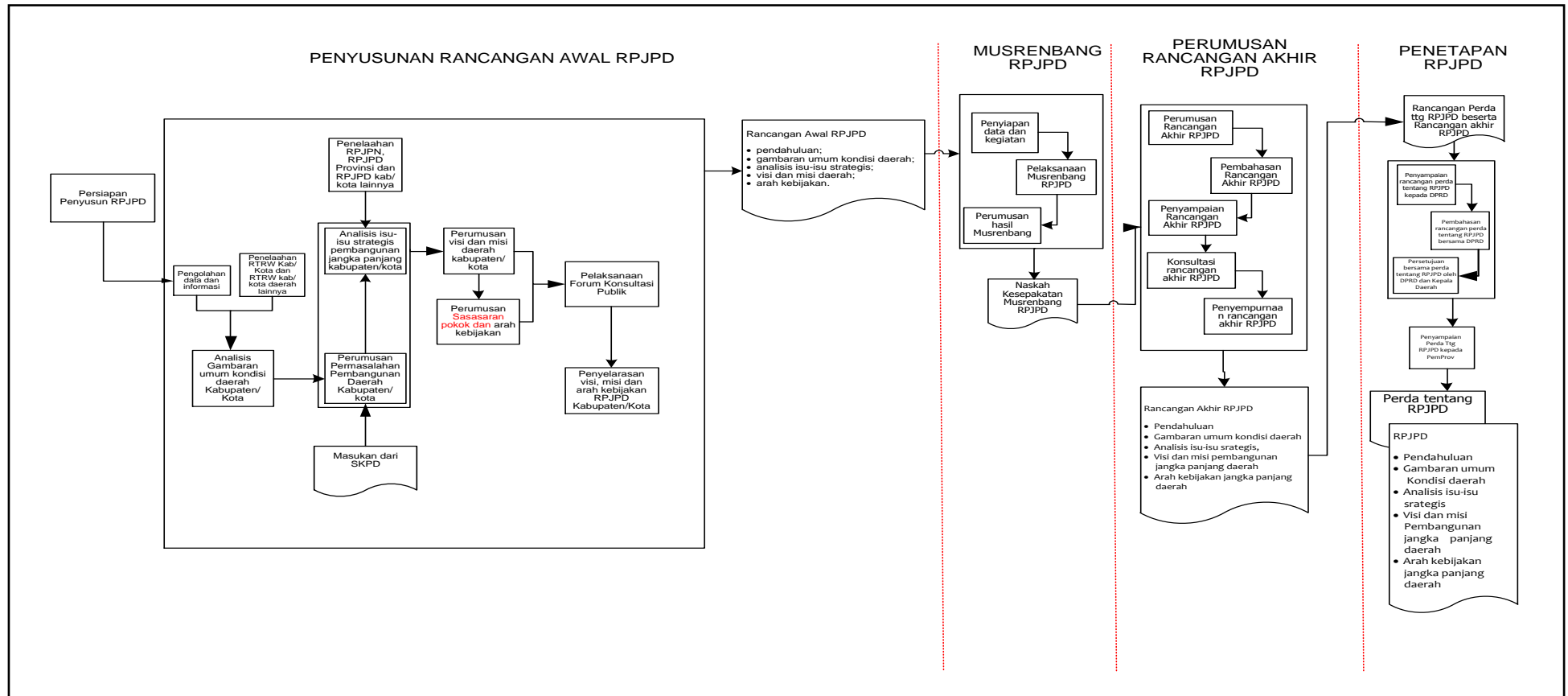
Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi sangat tergantung pada kualitas birokrasi. Pelayanan publik yang rendah, ekonomi biaya tinggi yang terjadi tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa Mentawai masuk dalam kancah regional dan nasional.

Dari sekian banyak masalah dan tantangan pembangunan, perlu dicari sebuah penggerak utama yang akan mendorong semua sektor yang ada, maka fokus pembangunan diarahkan pada fokus peningkatan sektor pariwisata, perikanan, pertanian dan perkebunan. Dengan pembangunan pada sektor utama itu diharapkan memberi daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata, dapat

dijadikan penggerak dan tulang punggung utama pembangunan, dengan strategi menarik sebanyak-banyaknya pelancong ke Mentawai melalui pembangunan pariwisata berkelas dunia.

Karena itu, Masyarakat Mentawai bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2005-2025 untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada, semua ini dilakukan untuk mencapai cita-cita Mentawai (i) mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mentawai melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis maritim (ii) mewujudkan masyarakat Mentawai yang maju, sehat, berbudaya dengan menjunjung tinggi keberagaman dan kemanusiaan berbasis Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata diseluruh pulau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Mentawai.

Gambar I.1
 Bagan Alir Penyusunan RPJPD Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya

RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025 disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi arah dan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional 2005-2025, RTRW Propinsi Sumatera Barat, RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. Dalam hal ini, proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur serta pola ruang Kabupaten/Kota yang lokasinya berada pada pesisir pantai sama seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai (Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan).

Gambar I.2
Kedudukan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berdasarkan pada urutan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
- BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis yang berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis
- BAB IV : Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memuat perumusan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- BAB V : Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.
- BAB VI : Kaidah Pelaksanaan pada bagian ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi dan misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD).

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta *Sustainable Development Goals* (SDGs)

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak antara 0°55'00"-3°21'00' Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00' Bujur Timur dengan luas wilayah 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai berbatasan dengan:

- sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut,
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai,
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- sedangkan sebelah barat juga berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau-pulau yang berjumlah sebanyak 99 buah. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan, 43 Desa dan 341 buah Dusun.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	2°49'04"-3°21'00"	100°07'01"-100°32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	2°37'12"-3°55'04"	100°00'00"-100°16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya	342,02	2°30'00"-2°51'36"	99°57'00"-100°09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	2°06'00"-2°24'36"	99°36'00"-99°52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	1°57'00"-2°18'00"	98°30'00"-99°42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	1°19'48"-1°42'00"	98°48'00"-99°18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	1°27'36"-1°57'00"	98°45'00"-99°19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	1°15'00"-1°33'00"	98°54'00"-99°12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabalu	816,11	0°54'00"-1°27'00"	98°40'48"-99°06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	0°55'00"-1°34'12"	98°35'00"-98°59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai dan berbukit-bukit, dengan rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota kecamatan 2 meter dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara dengan jarak tempuh ke Kota Padang sepanjang 95,1 mil. Untuk mencapai ibukota Provinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalan laut dan melalui transportasi udara. Keadaan topografi Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kelerengannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kelerengannya Tanah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	0 % – 8 %	237.756	39,55
2.	8 % – 14 %	185.921	30,93
3.	15 % – 25 %	158.726	26,40
4.	25 % – 40 %	18.362	3,05
5.	> 40 %	370	0,05
Total		601.135	100

Sumber : Interpretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD, diolah Tahun 2011

Ditinjau dari segi Geologi, Pulau Sipora dan Pulau Siberut mempunyai batu lempungan dengan di beberapa tempat ada sisipan batu beku. Dari umur geologi dapat diindikasikan sebagai wilayah yang masih muda. Untuk Pulau Siberut memiliki laju sedimentasi yang tinggi sehingga pulau ini juga merupakan pulau sedimentasi, yang dipenuhi oleh lumpur, tanah liat bercampur kapur yang masih relatif muda.

Sebagai pulau sedimen muda, jenis dan karakter tanah di Mentawai, terutama di pulau Siberut adalah jenis tanah aluvial yang tidak subur. Tanah di Siberut tergolong muda dengan kondisi tanah yang lunak dan tidak mengandung bebatuan yang besar. Hal ini karena memiliki litologi yang didominasi oleh sifat lempungan dan pola sesar yang berkembang secara intensif. Keadaan di Pulau Sipora hampir serupa, tanah berupa tanah liat yang berwarna keputihan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 18 sungai yang tersebar di keempat pulau. Pulau Siberut misalnya mengalir Sungai Saibi dan Sungai

Sikabaluhan sementara di Pagai Selatan terdapat Sungai Makalo. Curah hujan yang tinggi menjamin ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Berikut ini daftar nama-nama sungai yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Nama – nama Sungai di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama Sungai	Daerah Yang Dilalui	Panjang (Km)
1	Sungai Talopulai	Pagai Selatan	12
2	Sungai Makalo	Pagai Selatan	5
3	Sungai Silabu	Pagai Utara	8
4	Sungai Saumanganya	Pagai Utara	10
5	Sungai Taikako	Sikakap	15
6	Sungai Matobe	Sikakap	16
7	Sungai Saureinuk	Sipora Selatan	25
8	Sungai Pogari	Sipora Utara	12
9	Sungai Berimanua	Sipora Utara	10
10	Sungai Betumonga	Sipora Utara	15
11	Sungai Sagulubbek	Siberut Barat Daya	19
12	Sungai Taileleu	Siberut Barat Daya	16
13	Sungai Saibi	Siberut Tengah	12
14	Sungai Siberut	Siberut Selatan	20
15	Sungai Sikabaluhan	Siberut Utara	38
16	Sungai Simalegi	Siberut Barat	40
17	Sungai Simatalu	Siberut Barat	25
18	Sungai Berisigep	Siberut Barat	35

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Seperti dikemukakan bahwa sungai-sungai ini membawa padatan terlarut akibat erosi karena tanah yang nonresisten serta adanya kerusakan hutan di bagian hulu. Selain itu, sungai-sungai ini amat berperan penting bagi pertumbuhan vegetasi rawa seperti *Terminalia phellocarpa*. Pulau Siberut merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki litologi yang didominasi oleh sifat lempungan dan pola sesar yang berkembang secara intensif. Keadaan ini akan mempengaruhi ketersediaan air tanah maupun air permukaan. Air tanah yang ada dapat mengalami pengkayaan oleh unsur seperti Fe (besi).

Sesar-sesar yang ada memungkinkan terjadinya sejumlah mata air yang berasal dari aliran air tanah dangkal. Keberadaan air tanah ini sangat dipengaruhi oleh luasnya daerah tangkapan air dan tutupan lahan.

Secara klimatologi Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan terletak di daerah khatulistiwa mempunyai iklim dengan

udara yang panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi. Berdasarkan pola iklim yang ada di Indonesia, iklim Kabupaten Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh fenomena *global dipole mode* yang menghasilkan sirkulasi musim Monsoon dan konvergensi inter tropis (PMK-BMG, 2008). Sirkulasi angin bergerak ke arah Barat Laut-Tenggara menghasilkan musim penghujan (November – Maret). Sirkulasi angin Tenggara – Barat akan menghasilkan musim kemarau yang berlangsung mulai bulan Mei – Oktober.

Kondisi iklim mempengaruhi temperatur suhu permukaan laut yang menyebabkan perairan Kepulauan Mentawai banyak didiami ikan-ikan pelagis besar. Dari segi transportasi, cuaca di Kepulauan Mentawai bisa menjadi tidak bersahabat jika timbul angin dengan kecepatan besar yang menimbulkan tinggi gelombang > 2 meter pada bulan Agustus - Januari. Kondisi ini menyulitkan mobilitas transportasi laut, karena ketika kondisi gelombang tinggi, akses transportasi untuk ke Kepulauan Mentawai menjadi terhambat.

Curah hujan di Kepulauan Mentawai berkisar antara 2.500 – 4.700 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 132 – 267 hari hujan per tahun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sedangkan suhu berkisar antara 22^o-32^oC dengan kelembaban antara 82 - 85%. Curah hujan yang tinggi pada tanah non resisten akan berakibat pada banyaknya tanah yang terbawa oleh sungai dan ditimbun atau diendapkan pada dataran di daerah pantai timur dan pantai barat daya.

Badai menjadi salah satu kendala utama transportasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengandalkan transportasi laut. Musim badai biasanya mencapai puncaknya bulan Agustus sampai September. Pada saat musim badai biasanya angkutan penyeberangan melayani penumpang dengan mempertimbangkan keadaan alam, bila tidak memungkinkan kapal tidak akan melayani rute pelayaran, sehingga arus mobilitas barang, jasa dan manusia menjadi terhambat.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

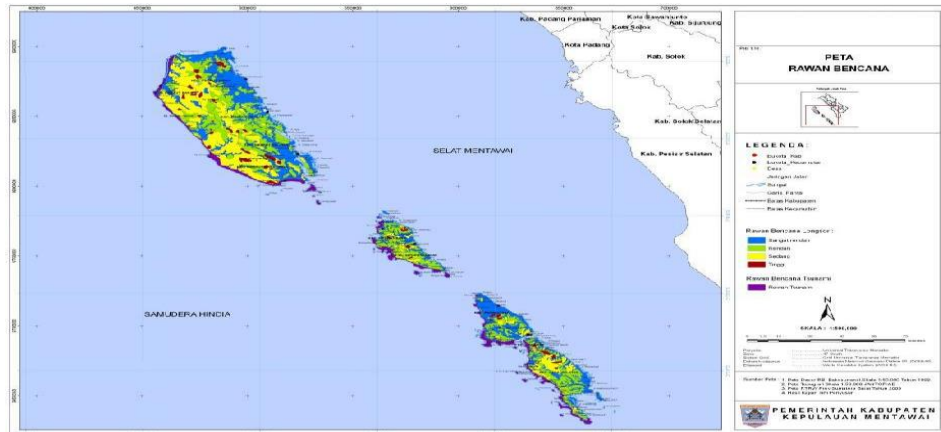
Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau dengan potensi yang berbeda beda sebagai berikut :

1. Pulau Siberut
 - a. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
 - b. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
 - c. Pengembangan Bandar Udara
 - d. Pengembangan Pelabuhan Laut
 - e. Pengembangan Kawasan Wisata
 - f. Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan / peternakan
 - g. Pembangunan prasarana dan sarana serta jaringan jalan dalam kawasan Taman Nasional
2. Pulau Sipora
 - a. Pembangunan Kawasan Huntap dan Lahan Usaha
 - b. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
 - c. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
 - d. Pengembangan Bandar Udara
 - e. Pengembangan Pelabuhan Laut
 - f. Pengembangan Kawasan Wisata
 - g. Pembangunan kegiatan industri
3. Pagai Utara
 - a. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
 - b. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
 - c. Pengembangan Bandar Udara
 - d. Pengembangan Pelabuhan Laut
 - e. Pengembangan Kawasan Wisata
 - f. Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan / peternakan
 - g. Pembangunan prasarana dan sarana serta jaringan jalan dalam kawasan Taman Nasional
4. Pagai Selatan
 - a. Pembangunan Kawasan Huntap dan Lahan Usaha
 - b. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
 - c. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
 - d. Pengembangan Pelabuhan Laut
 - e. Pengembangan Kawasan Wisata
 - f. Pengembangan kawasan pertanian dan peternakan

2.1.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak dekat di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia, yang membuat Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah rawan bencana, gempa, longsor maupun banjir.

Gambar 2.1
Peta Mitigasi Bencana



Tabel 2.4
Desa – Desa Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Jenis	Jumlah Desa
1	Gempa bumi	43 desa
2	Tanah longsor	13 desa
3	Banjir	26 desa
4	Desa di kawasan lindung	10 desa

Tabel 2.5
Wilayah Abrasi Pantai Terparah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
1	Siberut Utara	Pantai Muara Sikabaluan	Abrasi sudah mengarah ke pemukiman
2	Siberut Selatan	Pantai Muara Siberut	Abrasi sudah mengarah ke pemukiman
3	Sipora Utara	Pantai Mapadegat	Abrasi sudah mengarah ke akses jalan
		Pantai Tuapejat	Abrasi sudah mengarah ke akses Jalan
4	Sipora Selatan	Pantai Sioban	Abrasi sudah mengarah ke akses jalan
		Pantai Beriulou	Abrasi sudah mengarah ke Pemukiman

No	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Pantai desa Bosua	Abrasi mengarah ke akses jalan
		Pantai Bandara Rokot Matobek	Abrasi mengarah ke lokasi Bandara
5	Sikakap	Pantai depan SMA I Sikakap	Abrasi mengarah ke halaman sekolah

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan hampir semua desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang rawan bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah.

2.1.4 Demografi

Sementara itu kondisi demografi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk.

Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk
Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
			Laki-Laki	Perempuan		
1	Pagai Selatan	901,08	5.539	4.949	10.488	11,64
2	Sikakap	278,45	5.492	5.027	10.519	37,78
3	Pagai Utara	342,02	3.259	3.006	6.265	18,32
4	Sipora Selatan	268,47	5.365	5.040	10.405	38,76
5	Sipora Utara	383,08	5.756	5.292	11.048	28,84
6	Siberut Selatan	508,33	5.243	4.937	10.180	20,03
7	Siberut Barat Daya	649,08	3.799	3.485	7.284	11,22
8	Siberut Tengah	739,87	3.863	3.552	7.415	10,02
9	Siberut Utara	816,11	4.599	4.285	8.884	10,89
10	Siberut Barat	1.124,86	4.185	3.818	8.003	7,11
TOTAL		6.011,35	47.100	43.391	90.491	15.05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 tercatat sebanyak 90.491 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 47.100 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 43.391 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 rata-rata 15 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sipora Selatan yang hampir mencapai 39 orang per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Siberut Barat dengan 7 orang per km².

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0-04	2.677	2.425	5.102
05-09	5.117	4.829	9.946
10-14	5.682	5.304	10.986
15-19	5.191	4.853	10.044
20-24	4.347	4.171	8.518
25-29	3.977	3.909	7.886
30-34	4.150	3.692	7.842
35-39	3.454	3.091	6.545
40-44	3.039	2.772	5.811
45-49	2.581	2.268	4.849
50-54	2.125	1.758	3.883
55-59	1.667	1.598	3.265
60-64	1.215	981	2.196
65-69	755	731	1.045
70-74	557	488	1.045
+75	566	521	1.087

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.8 menunjukkan kelompok usia produktif dalam 5-10 tahun kedepan akan mengalami surplus (bonus demografi), sehingga tingkat ketergantungan setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif semakin kecil. Hal ini merupakan modal penting dalam ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam keberlanjutan proses pembangunan.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
0 -19 tahun	18.667	17.411	36.078
20 - 64 tahun	26.555	24.240	50.795
65 + tahun	1.878	1.740	3.618
Jumlah	47.100	43.391	90.491

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Analisa kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa indikator-indikator antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, pendapatan per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, angka partisipasi sekolah, angka kematian ibu dan anak, dan pelbagai indikator kesejahteraan masyarakat lainnya. Seluruh aktivitas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan paradigma pembangunan itu sendiri.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada hakekatnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebesar-besarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan *output* tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga.

Tabel 2.6 menunjukkan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat peningkatan jumlah PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2012-2016. Begitu juga laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2015 sampai 2016 terjadi perlambatan laju pertumbuhan yaitu pada angka 5,19 sedangkan di tahun 2015 melambat menjadi 5,01 pada angka 2016. Ini tidak terlepas dari gejolak ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional hingga ke daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	4,1	5,03	3,44	4,36	4,41
2	Pertambangan dan Penggalian	3,29	6,88	4,10	3,91	5,32
3	Industri Pengolahan	7,23	6,68	5,42	3,24	5,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	7,02	17,58	4,66	10,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,68	8,7	9	5,37	6,98
6	Konstruksi	8,83	9,77	9,45	9,20	6,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,07	7,26	8,74	4,53	6,04
8	Transportasi dan Pergudangan	6,34	4,9	9,56	5,21	2,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,72	4,29	8,67	7,27	12,6
10	Informasi dan Komunikasi	10,69	9,25	7,85	8,77	9,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,52	7,20	4,23	6,83
12	Real Estate	4,25	4,37	7,93	5,41	5,03
13	Jasa Perusahaan	8,71	9,88	10,13	7,50	5,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	2,38	2,87	5,80	4,72
15	Jasa Pendidikan	10,12	9,34	5,84	7,72	8,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,17	8,03	8,54	6,36	4,58
18	Jasa Lainnya	8,92	3,49	7,49	5,72	12,3
JUMLAH		5,38	5,77	5,57	5,19	5,01

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat umumnya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain sektor pertanian, sektor jasa lainnya juga memiliki potensi untuk berkembang di tahun mendatang. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan paling besar pada tahun 2016 yaitu naik sebesar 6,58 %.

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa sektor pertanian selama kurun waktu 2012 hingga 2016 memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai akan tetapi terus mengalami penurunan. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB berdasarkan harga konstan untuk setiap lapangan usaha tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

NO	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rupiah)									
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1	Pertanian	1.074.513,7	50,82	1.128.611,2	50,47	1,167,404.01	49,39	1,218,327.13	49,05	1,272,047.21	48,78
2	Pertambangan dan Penggalian	36.719,0	1,74	39.246,6	1,75	40,856.74	1,73	42,454.65	1,71	44,676.02	1,71
3	Industri Pengolahan	75.526,4	3,57	80.571,1	3,60	84,938.64	3,60	87,690.38	3,53	92,801.64	3,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	434,6	0,02	465,1	0,02	546.88	0,02	572.38	0,02	630.78	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70,1	0,003	76,2	0,003	83.05	0,004	87.51	0,004	93.63	0,004
6	Konstruksi	222.543,2	10,53	244.278,3	10,92	267,362.63	11,34	291,960.00	11,74	311,704.93	11,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	253.729,7	12,00	272.145,1	12,17	295,931.46	12,54	309,335.10	12,46	328,012.24	12,58
8	Transportasi dan Pergudangan	201.239,2	9,52	211.100,8	9,44	231,792.40	9,83	243,348.68	9,83	249,959.04	9,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.612,2	0,60	13.152,8	0,59	14,293.76	0,61	15,332.44	0,62	17,264.61	0,66
10	Informasi dan Komunikasi	19.152,3	0,91	20.923,3	0,94	22,565.00	0,96	24,543.10	0,99	26,788.34	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.597,9	0,12	2.793,3	0,12	2,994.49	0,13	3,121.23	0,13	3,334.55	0,13
12	Real Estate	19.670,2	0,93	20.529,4	0,92	22,156.50	0,94	23,354.15	0,94	24,527.77	0,94
13	Jasa	918,3	0,04	1.009,0	0,05	1,111.24	0,05	1,194.62	0,05	1,258.90	0,05

NO	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rupiah)									
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
	Perusahaan										
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	148.868,5	7,04	152.415,1	6,82	156,792.89	6,64	165,892.84	6,67	173,731.21	6,66
15	Jasa Pendidikan	18.877,4	0,89	20.639,8	0,92	21,845.65	0,93	23,531.56	0,95	25,478.39	0,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.732,6	0,55	12.674,7	0,57	13,757.08	0,58	14,632.60	0,59	15,302.69	0,59
17	Jasa Lainnya	15.114,0	0,71	15.641,8	0,70	16,813.39	0,71	17,775.73	0,72	19,962.86	0,77
	JUMLAH	2.114.319,3		2.236.273,6		2,361,245.81		2,483,154.10		2,607,574.80	

Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2016

b. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Keadaan tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas perekonomian daerah dapat tercermin dari tingkat inflasi suatu daerah. Secara umum, keadaan inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih baik, karena nilai inflasi kurun waktu 2011-2014 masih dalam kategori inflasi rendah (<10 persen).

Tabel 2.11
Nilai Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
Inflasi	6,62	4,90	5,92	7,18

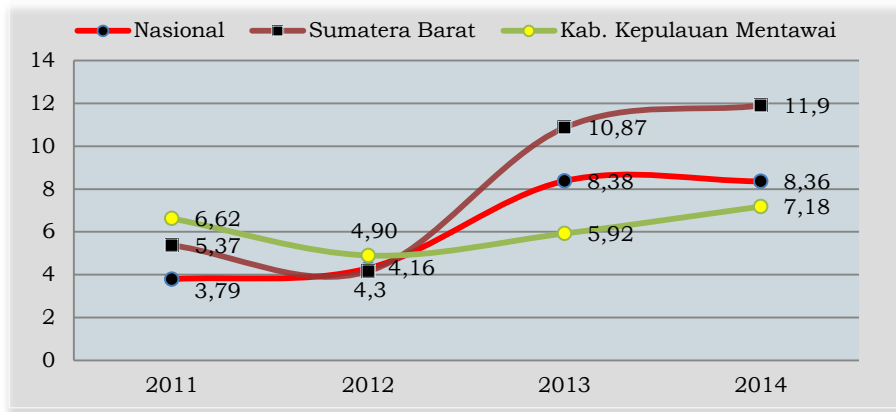
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi.

Keadaan inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami fluktuasi, yaitu dari 6,62 pada tahun 2011 turun menjadi 4,90 di tahun 2012, walaupun sedikit ada kenaikan di tahun 2012 dengan tingkat inflasi sebesar 5,92. Adanya gejolak harga di penghujung tahun 2014, terkhususnya kenaikan harga BBM memberikan dampak pada kenaikan laju inflasi Kepulauan Mentawai tahun 2014 pada posisi 7,18 persen. Namun, keadaan ini harus diperbaiki agar tingkat inflasi tidak melebihi 10 persen karena akan mengakibatkan terjadinya akselerasi kenaikan harga secara umum yang akan mengganggu stabilitas ekonomi baik nasional maupun di daerah.

Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pola inflasi tahunan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi Kepulauan Mentawai dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi provinsi dan nasional sejak tahun 2014.

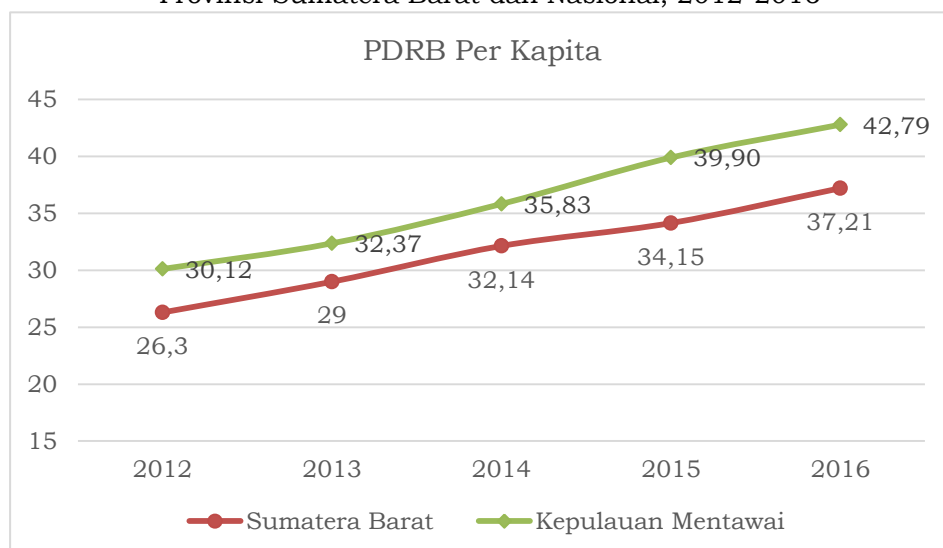
Gambar 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2011-2014



c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat. Gambar 2.3 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di atas pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.3
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

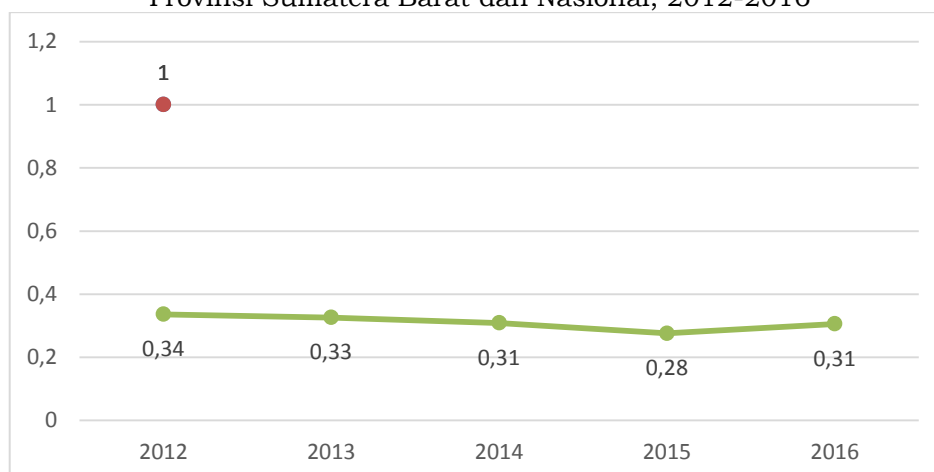
Kendati demikian, kurun waktu 2012-2016 terjadi *trend* positif kenaikan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

d. Rasio Gini

Perkembangan pendapatan per kapita secara kurun waktu mengalami peningkatan harus diikuti dengan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan (*redistribusi pendapatan/distribution of income*) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin di antara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan ataupun konflik sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah menggunakan rasio gini. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly inequal*, dimana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi.

Gambar 2.4
Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Pemerataan distribusi pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 berada dikisaran angka 0,28-0,34. Perkembangan indeks Gini Kepulauan Mentawai selama kurun waktu tersebut menunjukkan tren penurunan dan perbaikan. Hal ini berarti adanya potensi perbaikan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata di Kepulauan Mentawai.

e. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas diartikan sebagai rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya rata-rata tindak kriminal yang terjadi untuk pelbagai kategori kejahatan seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini dapat menggambarkan kondisi dan tingkat keamanan daerah, semakin rendah angka kriminalitas di suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat keamanan di suatu daerah.

Tabel 2.12
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	1	2	-	2
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	1	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	5	7	5	5
5.	Jumlah kasus Pencurian	7	15	9	28	21
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	4	6	2	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	10	25	24	36	31
9.	Jumlah Penduduk	76.173	78.215	79.976	81.840	88.846
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	3,28	3,06	4,5	3,66	3,76

Sumber: Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan suatu kemajuan, Seyogyanya keberhasilan ini mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Pembangunan yang dinilai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata belum membangun manusianya. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya, sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi

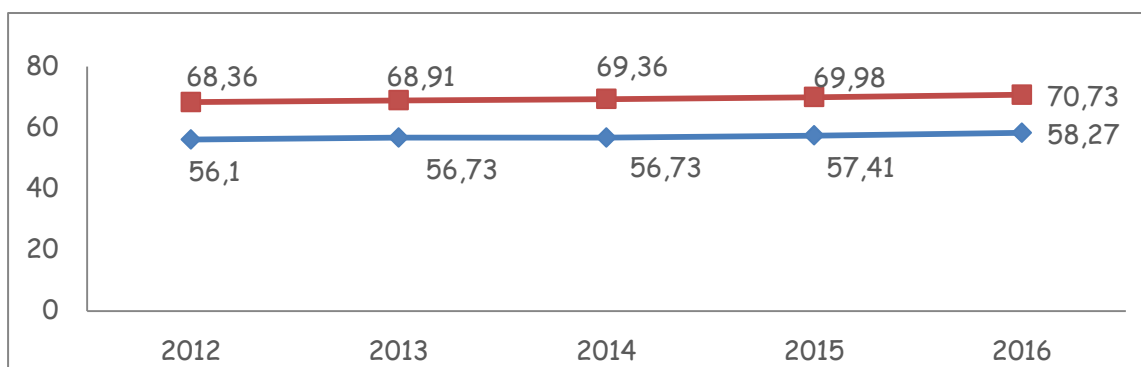
masyarakat. Analisa kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan manusia seperti: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, rasio guru dan murid dan pelbagai indikator lainnya.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tapi lebih konkret lagi adalah membangun manusianya. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi masyarakat, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan. Pembangunan juga memperhatikan upaya memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara optimal.

Untuk mengukur kualitas manusia di suatu daerah, indeks yang digunakan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelbagai manfaat pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar antara lain harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan standar hidup. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM nasional dalam kurun waktu yang sama.

Gambar 2.5
IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar kualitas hidup masyarakat Mentawai jauh lebih baik. Namun, jika dilihat tren perkembangannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dan perbaikan. Pada tahun 2015 IPM Kepulauan Mentawai berada pada posisi 57.41 meningkat di tahun 2016 menjadi 58.27

b. Indikator Pendidikan

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan masyarakat secara umum dapat diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan yang berhasil dicapai masyarakat dalam periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain yang akan dibahas adalah angka melek huruf, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM).

Secara umum keadaan kondisi pendidikan di Kepulauan Mentawai dapat dilihat dari perkembangan indikator makro pendidikan. Angka melek huruf menunjukkan perkembangan pembangunan pendidikan. Semakin besar angka melek huruf, berarti semakin banyak penduduk yang mengerti baca tulis.

Tabel 2.13
Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Indikator Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Melek Huruf (persen)	93,69	93,88	94,57	97,59	97,59
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,09	11,22	11,35	11,45	11,74
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,16	6,17	6,19	6,27	6,52
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD/MI	109,20	114,1	122,02	125,16	120, 25
	SMP/MTs	69,80	48,72	79,53	99,76	96,47
	SMA/SMK/MA	56,60	57,45	67,93	50,36	56,64
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD/MI	92,1	93,81	96,62	98,35	98,30
	SMP/MTs	52,3	36,44	63,91	70,98	59,19
	SMA/SMK/MA	41,7	51,85	53,55	46,18	39,41

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Selama kurun waktu tahun 2012-2016 keadaan angka melek huruf Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kepulauan Mentawai sebesar 93,69 meningkat menjadi 97,59 pada tahun 2016.

Angka harapan lama sekolah juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya ekspektasi bersekolah di Kepulauan Mentawai, tahun 2012 angka harapan lama sekolah sebesar 11,09 tahun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,74 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Sampai tahun 2016 rata-rata lama sekolah adalah 6,52 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai bersekolah sampai 6 tahun atau setingkat pendidikan SD. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 terjadi penurunan APM dan APK .baik SD, SMP dan SMA. Untuk tingkat SD APK pada tahun 2015 APK turun sebesar 125,16 turun menjadi 120,25 pada tahun 2016, APK SMP tahun 99,76 turun menjadi 96,47 pada tahun 2016, APK AMA tahun 2015 sebesar 50,36 naik menjadi 56,64 pada tahun 2016.

Sementara APM SD pada tahun 2015 sebesar 98,35 turun menjadi 98,30 pada tahun 2016, APM SMP sebesar 70,98 pada tahun 2015 turun menjadi 59,19 pada tahun 2016, APM SMA sebesar 46,18 turun menjadi 39,41 pada tahun 2016.

Secara keseluruhan APK dan APM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 masih rendah terkhususnya untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, hal ini menjadi acuan dalam perbaikan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

c. Indikator Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), yang berarti tingkat kepedulian masyarakat terhadap hidup sehat mengalami perubahan peningkatan perilaku. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan indikator kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 mengalami perbaikan pencapaian di beberapa indikator kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari 64,36 tahun (tahun 2015) meningkat menjadi 64,36 tahun (tahun 2016), begitu juga dengan indikator angka kesakitan

(morbiditas) juga mengalami penurunan dari 13,21 persen (tahun 2015) menjadi 12,14 persen (tahun 2016).

Tabel 2.14
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Indikator Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	63,53	63,53	63,55	64,05	64,36
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	30	23	26	17	30
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	6	5	8	5	5,3
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	317	276	444	484	442
Prevalensi Gizi Buruk	4,3	4,4	3,3	3,3	3,5
Prevalensi Gizi Kurang	17,7	15	13,3	7,8	9,4
Pemberian ASI	-	55	58	65	75,1
Angka Kesakitan/Morbiditas (persen)	16,7	16,12	14,96	13,21	12,14
Angka Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (persen)	71,61	75,39	61	78	56,82

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

d. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 2 persen/tahun menjadi poin positif dalam ketersediaan sumber daya manusia kedepan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun disisi lain, pertumbuhan penduduk ini akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan pembangunan akibat tidak tersedianya lapangan usaha dan tidak berkembangnya kreativitas masyarakat (tidak berjiwa wirausaha/*enterprenuer*). Pandangan masyarakat bahwa pekerjaan itu adalah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadikan banyak lulusan-lulusan di akademi/perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi akademiknya untuk dikembangkan di sektor non pemerintah atau berwirausaha. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

Secara umum, orientasi pekerjaan di Kepulauan Mentawai di dominasi pada pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian lebih dari 50 persen terhadap PDRB Kepulauan Mentawai. Tenaga kerja di Kepulauan Mentawai berdasarkan status pekerjaannya dikelompokkan pada pekerja keluarga atau buruh tidak dibayar. Namun, pada tahun 2016 untuk status pekerjaan tenaga kerja berusaha sendiri (wirausaha) mengalami penurunan dari 27,33 persen tahun 2014 menjadi 17,04 persen tahun 2015.

Tabel 2.15
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen)
Tahun 2012-2015

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	13,08	10,64	27,33	17,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	30,31	33,76	27,24	26,41
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar	0,93	0,82	1,08	0,86
Buruh/karyawan/Pegawai	17,22	12,78	13,36	16,28
Pekerja Bebas	1,43	3,65	6,12	2,61
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	37,03	38,35	24,87	36,8

Sumber: Inkesra Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai yang mencari pekerjaan tahun 2015 sebesar 1,25 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, satu atau dua diantaranya adalah penganggur. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka ini dikarenakan oleh hampir semua rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusahakan pertanian tanaman pangan.

e. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyak pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin. Mengacu pada konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Secara umum Bank Dunia (2000) menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah kekurangan dalam kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan di Kepulauan Mentawai dapat dilihat melalui Tabel 2.16 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 mengalami penurunan dari 13.160 (15,52 %) jiwa di tahun 2015 menjadi 13.090 (15,52) jiwa di tahun 2016.

Tabel 2.16
Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Miskin (jiwa)	13.100	13.265	12.580	13.160	13.090
Persentase Penduduk Miskin (persen)	16,7	16,12	14,96	15,52	15,12
Garis Kemiskinan (Rp)	208.045	217.773	223.814	235.897	263.793
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,21	2,04	2.21	2,83	2,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,37	0,46	0.55	0,71	0,6

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Indeks kedalaman kemiskinan di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan, artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kepulauan Mentawai sudah mendekati garis kemiskinan dan akan berpeluang besar menuju garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang cukup berarti, artinya masih besarnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai.

2.2.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analogi dengan pembangunan ekonomi yang bermakna sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, maka pembangunan kesenian dan kebudayaan akan bermakna sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sosial kultural, yaitu nilai tambah kemartabatan, nilai tambah kebanggaan, nilai tambah jati diri dan nilai tambah akal budi serta budi pekerti. Kekuatan budaya yang senantiasa ada pada setiap kegiatan sehari-hari ini membentuk karakter masyarakat, melalui budaya, yang tentunya didalamnya pasti ada kesenian, karakter masyarakat dibangun.

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan nasional yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Tabel 2.17
Perkembangan Seni, Budaya, Kepemudaan, dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	7	9	12	0	11
2	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	0	0
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	2	0	1	2
4	Jumlah Organisasi Kepemudaan	0	21	22	7	10
5	Jumlah klub olahraga	0	17	15	0	1
6	Jumlah gedung olahraga	0	7	7	7	5

Sumber: Disbudparpora Kab. Kepulauan Mentawai

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau dari pada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial; (7) tenaga kerja; (8) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak; (9) Pangan; (10) Pertanahan; (11) Lingkungan Hidup; (12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (15) Perhubungan; (16) Komunikasi dan Informatika; (17) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (18) Penanaman Modal; (19) Kepemudaan dan Olah Raga; (20) Persandian; (21) Kebudayaan; (22) Perpustakaan; (23) Kearsipan.

a. Urusan Wajib Pendidikan

Salah satu upaya pemerintah baik pusat maupun di daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya adalah melalui pendidikan, karena tujuan dasar pembangunan adalah membangun manusianya.

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dirasakan belum tercapai secara maksimal, ini dapat dilihat dari pelbagai indikator-indikator dalam

pendidikan, seperti angka partisipasi masyarakat, rasio guru dan murid, rasio sekolah dengan murid dan beberapa indikator lainnya.

a) APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi anak usia sekolah dapat diketahui melalui Tabel 2.18. Perkembangan Tingkat Partisipasi Sekolah dari tahun 2012-2016 menunjukkan adanya peningkatan pencapaian. Pada tahun 2014 Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SD, SMP maupun SMA mengalami peningkatan. Untuk SD/MI dari 95,95 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 91,30 persen pada tahun 2016, pada jenjang SMP/MTs nilai APS 60,12 persen tahun 2015 menurun menjadi 52,40 persen. Begitu juga untuk jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 48,67 tahun 2017 menjadi 42,90 tahun 2016.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	12.575	12.563	12.924	13.741	12.037
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.575	13.562	13.204	13.184	13.184
1.3	APS SD/MI	92,63	92,63	97,87	95,95	91,30
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	3.943	3.939	6.160	3814	3.324
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.084	5.079	6.368	6.344	6.344
2.3	APS SMP/MTs	77,56	77,56	96,72	60,12	52,40
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	2.239	2.237	3.490	2.826	2.491
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	3.450	3.447	4.001	5.807	5.807
3.3	APS SMP/MTs	64,9	64,9	87,23	48,67	42,90

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

b) Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai memang menjadi persoalan tersendiri, hal ini disebabkan selain karena letak geografis Kepulauan Mentawai juga belum terbukanya akses jalan penghubung antar dusun dan desa.

Rasio ketersediaan unit sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat melalui Tabel 2.19. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah mencukupi. Untuk

tahun 2016 nilai rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 112,65 persen, artinya untuk setiap 1 unit sekolah yang tersedia secara rata-rata menampung 112 orang peserta didik.

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	108	108	108	117	117
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.575	13.562	13.204	13120	13180
1.3	Rasio	125,69	125,57	122,26	112,14	112,65
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	19	21	21	27	27
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5084	5079	6368	6468	6232
2.3	Rasio	267,56	241,85	303,25	239,56	230,81
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	6	9	9	14	14
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	3.450	3.447	4.001	5807	5933
3.3	Rasio	575,02	382,98	444,54	414,79	423,79

Sumber: Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs untuk tahun 2015 sebesar 239,56, artinya untuk setiap 1 unit sekolah dapat menampung 240 orang peserta didik. Tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 230,81 artinya untuk setiap 1 unit sekolah dapat menampung 231 orang peserta didik.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA untuk tahun 2015 sebesar 414,79, artinya untuk setiap 1 unit sekolah menampung 414 orang peserta didik. Kondisi ini meningkat di tahun 2016 dengan angka rasio sebesar 423,79.

c. Rasio Guru dengan Murid

Rasio guru dengan murid didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu jenjang pendidikan sekolah atau daerah tertentu. Angka rasio guru dengan murid juga dapat menunjukkan keefektifan

seorang guru terhadap jumlah siswa yang dilayani. UNESCO (2014) menetapkan rasio guru dan murid antara lain dengan perbandingan 1:26 untuk negara-negara Asia, dan 1:24 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

Tabel 2.20
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	646	990	990	1287	1301
1.2	Jumlah Murid	13.425	14.730	14.730	15334	14961
1.3	Rasio	20,78	14,88	14,8788	11,91	11,5
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	268	309	329	399	405
2.2	Jumlah Murid	4.242	4.130	4.143	4962	5058
2.3	Rasio	10,69	13,37	12,59	12,44	12,49
3	SMA/SMK/MA					
3,1	Jumlah Guru	226	227	228	372	282
3,2	Jumlah Murid	2.865	2.929	2.918	3512	3727
3,2	Rasio	12,68	12,9	12,8	9,44	9,76

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

Tabel 2.20 menunjukkan rasio antara jumlah guru dengan jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.20 tersebut menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid di Kepulauan Mentawai di setiap jenjang sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa di setiap jenjang pendidikan sekolah rasio antara guru dan murid di Kabupaten Kepulauan Mentawai di bawah 1:26.

c) Kelulusan Siswa Peserta UN (Ujian Nasional)

Hasil akhir yang menentukan keberhasilan ketercapaian proses pembelajaran di sekolah diketahui melalui serangkaian ujian, mulai dari ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan diakhir masing-masing jenjang pendidikan akan dilalui ujian nasional (UN).

Tabel 2.21 menunjukkan persentase kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dalam ujian nasional (UN). Persentase kelulusan di masing-masing jenjang pendidikan berada pada kisaran 97 persen di tahun 2014-2016.

Tabel 2.21
Jumlah Peserta UN dan yang Lulus UN
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Jenjang Pendidikan		2012	2013	2014	2015	2016
SD	Jumlah Peserta UN	1.766	1.845	1.845	1981	2017
	Jumlah Peserta Lulus UN	1.764	1.845	1.845	1981	2017
	Persentase	99,89	100	100	100,00%	100,00%
SMP	Jumlah Peserta UN	910	1.094	1.094	1387	1577
	Jumlah Peserta Lulus UN	910	1.089	1.089	1365	1435
	Persentase	100	99,54	99,54	98%	91%
SMA	Jumlah Peserta UN	635	737	737	954	934
	Jumlah Peserta Lulus UN	596	710	710	924	924
	Persentase	93,86	96,34	96,34	97%	99%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

d) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Salah satu syarat menjadi guru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Pada tabel 2.22 terlihat bahwa guru-guru pada jenjang SD sekitar %0 % yang berkualifikasi S1 / D IV

Tabel 2.22
Jumlah Guru dengan Kualifikasi Akademik S1/D-IV
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	987	1280	1280	1287	1301
1.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	548	622	622	796	801
	Persentase	55,52%	48,59%	48,59%	61,85%	61,57%
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	268	364	364	399	405
2.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	268	314	314	370	376
	Persentase	100,00%	86,26%	86,26%	92,73%	92,84%
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	207	288	300	372	382
3.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	207	240	240	362	372
3.3	Persentase	100%	83%	80%	97%	97%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

a) Jumlah Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.23
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tenaga Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter	15	5	5	15	25
Perawat	137	152	239	257	329
Bidan	41	83	153	181	239
Dukun Bermitra	-	62	129	188	181

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Tabel 2.23 menunjukkan secara umum adanya peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

b) Jumlah Sarana Kesehatan

Upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan (*health services*). Pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana usaha preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.24
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Sarana Layanan Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	10	10	10	10	12
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	14	14	21	22	22
4	Poskesdes	47	34	68	67	71
5	Posyandu	193	243	255	255	255
6	Polindes	16	19	11	32	52

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah kebutuhan mendasar dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal terpenting dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat adalah akses pelayanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.24 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat menjadi perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan.

c) Rasio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.25 menunjukkan masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Angka rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk tahun 2012-2016 masih sangat besar, ini berarti masih perlu upaya yang keras dalam menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.25
Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	18	8	12	20	35
2	Jumlah Penduduk	79.976	81.840	83.803	85.295	86.981
3	Rasio	0,023%	0,010%	0,014%	0,023%	0,040%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

d) Jumlah bayi yang diberi imunisasi

Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang amat bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi. Tujuan dari imunisasi adalah untuk melindungi anak dari penyakit tertentu, yang pada akhirnya mengeradikasi suatu penyakit. Kesadaran masyarakat akan kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberian imunisasi adalah salah satunya.

Tabel 2.26
Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Jenis Imunisasi	2012	2013	2014	2015	2016
BCG	1.074	1.290	1.455	1547	1428
Polio 4	905	1.362	1.540	1439	1487
Campak	1.013	1.211	1.569	1427	1311
DPT 1	1.431	1.916	1.448	1480	1537

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)

c. Infrastruktur Publik

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana umum mutlak disediakan oleh pemerintah dalam rangka

menstimulus roda perekonomian masyarakat, seperti penyediaan saluran irigasi, jalan, jembatan, air bersih.

a). Kondisi Jaringan Jalan

Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya. Sebagai prasarana publik, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat.

Tabel 2.27
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Kondisi Jalan (km)			Panjang Jalan (km)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2012	57,84	143,1	620,76	821,7
2013	66,03	143,1	612,57	821,7
2014	83,38	143,1	602,23	828,7
2015	97,42	164,23	590,14	851,55
2016	92,31	65,35	972,8	1130,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Tabel 2.27 menunjukkan kondisi jalan yang masih memperhatikan, namun upaya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik bagi masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b). Kondisi jaringan jembatan

Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*).

Tabel 2.28
Kondisi Jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Kondisi Jembatan (m)			Panjang Jembatan (m)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2013	157	652	1.743	2.552
2014	229	652	1.671	2.552
2015	239	652	1661	2.552
2016	259	652	1641	2.552

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Jembatan sebagai sarana transportasi memegang peranan penting dalam menghubungkan dua tempat yang terpisah. Tabel 2.28 menunjukkan di tahun 2016 terjadi peningkatan volume jembatan yang berarti baik dari sisi panjang jembatan maupun kondisi jembatan dalam keadaan baik. Sebagai penghubung dua tempat terpisah, jembatan sangat diperlukan oleh masyarakat terutama dalam hal akses mobilitas barang dan orang agar lebih efisien dan efektif. Tabel 2.26 menunjukkan perkembangan kondisi jembatan dalam keadaan baik mengalami peningkatan. Tahun 2015 panjang total jembatan dalam kondisi baik dengan total panjang jembatan 239 m meningkat di tahun 2016 menjadi 259 km.

c). Perhubungan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum merupakan hal mendasar bagi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Sebagai wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mewujudkannya pada pembangunan pelabuhan/dermaga, penyediaan kapal laut, pelabuhan udara. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah belakang (*interland*) dan untuk menunjang kelancaran perdagangan antar pulau serta perkembangan daerah sekitarnya.

Tabel 2.29
Jumlah Pelabuhan/Dermaga dan Bandara, 2012-2016

Tahun	Pelabuhan/ Dermaga	Bandara
2012	8	1
2013	8	1
2014	15	1
2015	21	1
2016	21	1

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Ketersediaan infrastruktur perhubungan yang memadai akan memacu pergerakan barang dan orang. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel 2.30 yang menunjukkan perkembangan indikator kinerja perhubungan. Untuk kunjungan kapal kurun waktu 2012-2016 untuk kunjungan mengalami kenaikan. Untuk jumlah penumpang naik dan turun beserta jumlah bongkar muat kurun waktu 2012-2016 juga mengalami peningkatan. Nilai bongkar muat tahun 2016 senilai 87.456 ton mengalami peningkatan dari tahun 2015.

Tabel 2.30
Kondisi Indikator Kinerja Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan Kapal (kali)	2.454	2.385	2.097	4.867	4950
2	Penumpang Naik-Turun (kali)	100.706	109.797	115.823	93.313	101235
3	Bongkar-Muat (ton)	48.165	110.729	83.931	85.329	87456

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

d). Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung mangrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan

Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabaluan, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

e). Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* process untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2015, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Dokumen perencanaan daerah yang telah disusun antara lain:

- 1) Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
- 4) Renstra SKPD
- 5) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- 6) Rencana Kerja SKPD

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertanian dan peternakan

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman

pangan (beras) karena alih fungsi lahan ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi pembaharuan pangan yang berintegrasi dengan strategi pembaharuan ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

a). Cetak sawah

Kekuatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada di sektor pertanian, jika dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 50 persen. Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah cetak sawah.

Tabel 2.31
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah, 2012-2016

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	307	439	1.843,80
2013	743	389	1.634,40
2014	1.162	863	3.625,00
2015	1024	1146	2.878,00
2016	1.311	1184	4.973,00

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Tabel 2.31 menunjukkan program prioritas pemerintah dalam menjawab ketahanan pangan melalui program cetak sawah secara statistik menunjukkan peningkatan, baik secara luas tanam maupun produksi. Tahun 2016 produksi padi sawah sudah mencapai 4.973 ton dengan luas panen 1184 ha. Namun, pencapaian ini secara rasio produksi tanaman padi sawah belum maksimal dan perlu *treatment* khusus dalam upaya peningkatan hasil panen.

b). Keladi

Sebagai makanan pokok masyarakat Mentawai, tanaman keladi sudah merupakan tanaman keluarga. Seiring dengan program pemerintah dalam menggalakkan ketahanan pangan melalui program cetak sawah, tanaman

keladi menjadi pilihan kedua bagi masyarakat Mentawai. Menanam keladi menjadi kesibukan selingan bagi para petani sehari-hari.

Tabel 2.32 menunjukkan penurunan pencapaian komoditi keladi baik dari luas tanam, luas panen maupun hasil produksi. Tahun 2015 luas tanam mencapai 274 ha dengan produksi 1.778 ton, pada tahun 2016 menurun dengan luas tanam 166 ha dan hasil produksi hanya 1.079 ton.

Tabel 2.32

Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Keladi, 2012-2016

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	563	471	3.768
2013	487	330	3.430
2014	286	330	2.069
2015	274	274	1.778
2016	166	166	1.079

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

c). Perkebunan

Luasan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkontur bergelombang menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan komoditas perkebunan lainnya.

Hasil perkebunan yang cukup melimpah (bahan baku) dengan didukung prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan.

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktivitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, fokus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai.

Pengembangan ekonomi pertanian dan perkebunan berbasis kawasan menjadi pilihan tepat yang dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis.

Tabel 2.33
Perkembangan Hasil Komoditi Pertanian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Komoditi Perkebunan	2012	2013	2014	2015	2016
Durian (kwintal)	7.930	6.057	32.261	20088	726
Mangga (kwintal)	32.320	785	1.002	219	39
Jeruk (kwintal)	1.806	1.506	1.968	15	15
Pisang (kwintal)	15.262	46.224	55.309	25639	25693
Nangka (kwintal)	13.130	11.689	12.997	4336	4336
Kelapa (ton)	6.876	7.460	7.634	6564,6	6494,585
Cengkeh (ton)	-	457	62	555,41	97,78
Pala (ton)	423	422	245	119,45	111,1
Nilam (ton)	24,1	23,3	7,49	3,36	3,81
Kakao (ton)	1.437	1.738	1.466	575,8	487,9

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

b). Populasi Ternak

Populasi hewan ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai didominasi oleh sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas.

Tabel 2.34
Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Unggas (ekor), 2012-2016

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2010	916	94	714	47.248	85.070
2011	1.097	103	674	45.518	98.160
2012	1.194	131	722	47.389	126.747
2013	987	91	818	31.168	115.767
2014	837	82	682	32.274	65.654

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

b. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Tabel 2.35 menunjukkan jumlah produksi ikan tangkap di perairan Mentawai.

Tabel 2.35
Jumlah Nelayan dan Produksi Ikan Laut
Kabupaten kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Jumlah	
	Nelayan (orang)	Produksi Ikan Laut (ton)
2012	2.206	4.148
2013	2.149	5.278
2014	2.979	4.701
2015	3.130	5.252
2016	3.243	6.920

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Potensi laut Kepulauan Mentawai senilai 7 triliun rupiah memang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Mentawai khususnya masyarakat nelayan dan di wilayah pesisir. Penerapan teknologi tepat guna, kemampuan dan kemauan sumber daya masyarakat yang masih terbatas merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c. Energi dan sumber daya mineral

Energi merupakan hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Salah satu energi yang sangat dibutuhkan adalah listrik. Pasokan energi listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didominasi, disediakan dan didistribusikan oleh PLN. Tabel 2.36 menunjukkan jumlah masyarakat yang sudah menikmati/teraliri aliran listrik.

Tabel 2.36
Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung, 2012-2016

Tahun	Pelanggan	Daya Tersambung (VA)
2012	4.537	4.316.198
2013	5.525	5.848.850
2014	5.525	5.848.850
2015	6.572	7.260.400
2016	6.572	7.260.400

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik, begitu juga dengan keterbatasan daya tampung/beban aliran listrik, maka perlu adanya energi terbaru dan terbarukan untuk mengatasi ketergantungan pada energi listrik konvensional. Potensi pengembangan energi baru dan terbarukan sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangan energi biomassa baik berbahan bambu ataupun sampah (biogas), PLTS, PLMTH, bahkan pembangkit listrik tenaga gelombang laut sangat rasional dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengembangan energi baru dan terbarukan tentunya dengan memperhitungkan *cost benefit* bagi masyarakat.

d. Pariwisata

Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri.

Selain itu, diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha, dan pengentasan kemiskinan.

a). Kawasan Objek Wisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37
Banyaknya dan jenis Objek Wisata
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2012	13	12	32	57
2013	24	9	24	57
2014	24	9	24	57
2015	25	12	32	69
2016	25	12	32	69

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

b). Jumlah hotel/penginapan

Jenis kawasan objek wisata yang tersebar di pelbagai tempat/pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memunculkan beberapa industri pariwisata, salah satunya berdirinya pelbagai resort, penginapan, dan wisma. Tabel 2.38 menunjukkan banyaknya resort, penginapan dan wisma yang telah berdiri sejak tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.38
Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2012	13	12	32	57
2013	24	9	24	57
2014	24	9	24	57
2015	25	12	32	69
2016	25	12	32	69

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

d. Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan menyumbang 13 persen terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 berada pada posisi kedua

setelah sektor pertanian. Selama tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah menerbitkan 205 SIUP dari pelbagai bidang usaha. SIUP terbanyak diterbitkan untuk pedagang kecil yaitu sebanyak 179 SIUP (87,31 persen), sisanya 26 SIUP (12,69 persen) diterbitkan untuk pedagang menengah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Sampai tahun 2016, struktur ekonomi atau potensi unggulan daerah Kepulauan Mentawai masih didominasi oleh sektor Pariwisata, pertanian, dan perikanan. Berikut kami sajikan secara detail pada ulasan berikut:

2.4.1 Potensi Unggulan Daerah

1. Pariwisata

Kepulauan Mentawai memiliki potensi sumber daya alam yang jika dikelola akan mampu memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, begitu juga pariwisata dapat dijadikan *core industry* pengembangan ekonomi masyarakat. Potensi ini merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wisata yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas wisata bahari, alam dan budaya. Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 21 objek wisata panorama, 29 objek wisata bahari, 25 objek wisata sumber air, dan 10 objek wisata budaya. Dalam tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diidentifikasi beberapa kawasan pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan secara terintegrasi, kawasan tersebut antara lain:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), Benteng Peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan).
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan

- dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya).
- c. Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya.
 - d. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matuptuman Buggei Siata 50 ha.
 - e. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakuddei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

2. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh laut, maka daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan. Sebanyak 3.843 orang masyarakat Kepulauan Mentawai berprofesi sebagai nelayan, dengan rincian 1.777 merupakan nelayan penuh (*full time*) sedangkan sisanya sebanyak 1.100 orang merupakan nelayan sambilan utama (paruh waktu) dan 966 merupakan nelayan sambilan tambahan. Pada tahun 2016 produksi ikan Kepulauan Mentawai sebanyak 6.920 ton atau meningkat 31,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.252 ton. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi lestari perikanan laut sebesar 269.682 ton/tahun

3. Pertanian

Kekuatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada di sektor pertanian, jika dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 50 persen. Program cetak sawah menjadi program prioritas pembangunan dalam rangka ketahanan pangan daerah telah mengalami peningkatan baik

dalam luas panen maupun total produksi yang telah dihasilkan. Produksi padi sawah untuk tahun 2016 sebesar 4.964,40 ton menurun 11 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 5.581,80 ton. Penurunan ini terjadi karena menurunnya luas panen sebesar 11,06% pada tahun 2016 dimana pada tahun 2015 seluas 1.329 Ha menjadi 1.182 Ha pada tahun 2016. Namun luas tanam meningkat dari 1.102 Ha pada tahun 2015 menjadi 1.312 Ha pada tahun 2016 atau meningkat 19,06% karena terjadinya peningkatan luas tambah tanam pada bulan Oktober, November dan Desember 2016. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kepulauan Mentawai kedepan dengan penggunaan teknologi tepat guna tentunya akan mampu memberikan nilai tambah di setiap komoditi/produk hasil pertanian dan akan meningkatkan perekonomian petani Mentawai

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD, atau RPJPD). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi, sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar yang tidak dapat diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggara urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

3.1.1 Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Permasalahan pembangunan terkait urusan wajib pada dasarnya disebabkan karena pemerintah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayan Dasar

1. Pendidikan

Dalam rangka pembangunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah bidang pendidikan melalui indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.

Kualitas sumber daya manusia merupakan variabel strategi utama yang berpengaruh signifikan terhadap upaya percepatan proses pembangunan. Masih tingginya tingkat buta aksara di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini juga merupakan dampak dari tidak meratanya tingkat penyebaran sekolah di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beberapa permasalahan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Akses dan kualitas serta relevansi pendidikan yang masih rendah
2. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas
4. Manajemen dan tata kelola pendidikan belum efektif

2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya kurang gizi atau gizi buruk pada balita mencapai lebih dari 15 persen. Di samping itu,

juga masih minimnya tenaga kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan prasarana dan tenaga kesehatan yang terbatas pasca gempa ikut berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Semua kendala kesehatan tersebut akan berdampak pada 2 (dua) ukuran penting indikator kesehatan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), dan Umur Harapan Hidup (UHH). Dampaknya adalah upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak akan tercapai. Termasuk upaya dalam pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Target yang terdapat dalam MDGs tersebut antara lain menurunkan angka kematian bayi (23/100 kelahiran hidup) dan anak (32/1000 kelahiran hidup) sampai dua pertiganya dari jumlah saat ini, meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan (102/100.000 kelahiran hidup), memberantas penyakit-penyakit menular dan infeksi penyebab utama kematian, selanjutnya permasalahan kesehatan juga terjadi karena belum meratanya tingkat penyebaran pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan dan masih kurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat. Beberapa permasalahan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah
2. Status gizi masyarakat masih rendah
3. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi
4. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas
5. Keterseidaan abat dan pengawasan obat – makanan masih terbatas
6. Pemberian Jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal
8. Manajemen Pembangunan kesehatan belum efektif
9. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberadaan prasarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antar pusat kegiatan belum dapat melayani kebutuhan masyarakat, karena jaringan jalan yang ada hanya terdapat di pulau-pulau besar saja atau belum terhubungnya antar pusat kegiatan kecamatan yang berada dalam satu pulau dengan jaringan jalan. Beberapa pulau masih ada yang belum mempunyai jaringan jalan, sehingga penduduk maupun pengunjung yang akan mengunjungi daerah-daerah tersebut harus menempuh berjam-jam dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi laut.

Beberapa permasalahan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Rendahnya kualitas jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi / rawa
4. Belum optimalnya layanan air baku
5. Tingginya intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai
6. Masih rendahnya Pengendalian abrasi pantai

Implementasi perda RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih belum maksimal menjadi permasalahan dalam rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan ruang saat ini belum dipahami dengan baik dan menyeluruh.

Perencanaan tata ruang sebagai proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, susunan pusat-pusat pemukiman penduduk dan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah guna peruntukan bagi fungsi lindung dan fungsi budidaya belum sepenuhnya memperhatikan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. Konflik yang sering muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan tata ruang adalah dalam penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam hal ini, antar sektor dan instansi sering tidak terdapat kesepakatan. Pengertian dan batasan kawasan lindung antara Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan dan

Pemerintah Daerah sering terdapat perbedaan. Demikian juga halnya dengan masyarakat (adat). Akibatnya sering terjadi benturan dalam penentuan kawasan lindung dan budidaya. Kondisi ini menyebabkan rumitnya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang dan implementasinya di lapangan. Ketidakkonsistenan terhadap rencana tata ruang menyebabkan rencana tersebut tidak berjalan yang berujung pada tidak tertibnya pemanfaatan ruang dalam pembangunan. Kondisi ini juga ditemui di lapangan, termasuk pelanggaran peruntukan lahan yang dilaksanakan oleh aparaturnya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya untuk senantiasa mengacu pada rencana tata ruang yang ada. Karakteristik Kepulauan Mentawai yang merupakan daerah gugusan pulau merupakan karakteristik tersendiri yang membutuhkan perencanaan tata ruang berbasis spesifikasi gugusan kepulauan dengan pulau kecil. Perencanaan dengan karakteristik ini harus menjadi pertimbangan utama dalam RTRW yang sedang disusun. RTRW Kepulauan Mentawai juga harus memasukkan kawasan rawan bencana serta kawasan wilayah pesisir dan laut dalam satu kesatuan rencana tata ruang. Beberapa permasalahan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum selesainya penyusunan penataan ruang daerah
 2. Belum optimalnya pembinaan penataan ruang
 3. Belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah untuk pemanfaatan ruang
 4. Belum tersedianya instrument pengendalian ruang untuk penataan ruang
 5. Belum terbentuknya pengawasan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan swasta, masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Bila melihat fenomena tersebut maka dapat diperkirakan bahwa masa mendatang, kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Di bidang perumahan dan permukiman, permasalahan untuk pusat kegiatan

wilayah/lokal seperti Tuapeijat adalah ketersediaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan bagi masyarakat, terutama di wilayah pusat kegiatan. Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kondisi objektif di lapangan, tidak semua kecamatan memiliki sumber air bersih yang bisa diolah untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Peningkatan pembangunan jumlah rumah tinggal baru dikawasan yang baru tumbuh dan berubah fungsi di kawasan pusat kegiatan, jelas memerlukan pasokan air bersih untuk minum, mandi dan cuci yang relatif besar. Pemerintah ataupun swasta perlu bergerak dalam pengadaan air bersih. Selain itu untuk bidang prasarana adalah permasalahan drainase dan limbah di setiap pusat kegiatan yang ada di kecamatan, walaupun saat ini belum menjadi permasalahan besar, namun perlu direncanakan dengan baik dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Semestinya sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap PKL seperti Tuapeijat adalah pelabuhan laut regional/lokal, pasar lokal, rumah sakit umum tipe C, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Beberapa permasalahan Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan permukiman
3. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki perumahan yang layak huni
4. Belum terpenuhinya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang aman
5. Semakin luasnya permukiman kumuh
6. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas
7. Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum tersedia

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketidakadaan SOP maupun SPM perlindungan masyarakat membuat pemerintah tidak dapat bekerja maksimal dalam menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Beberapa permasalahan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum optimalnya perlindungan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat dan tenaga kerja
2. Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi/kerjasama dengan lembaga keamanan
3. Masih rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian daerah
4. Masih rendahnya fungsi koordinasi pemerintah daerah

6. Sosial

Adanya pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat yang berada jauh dari kehidupan modern. Serta Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Beberapa permasalahan pemerintahan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Kurang akuratnya data masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Belum maksimalnya program pemberdayaan komunitas adat.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja.

Sebagian besar masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan kurangnya lapangan perkerjaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (terkait pendidikan) juga menjadi alasan masyarakat kabupaten kepulauan Mentawai kurang mampu bersaing dengan masyarakat yang berasal dari luar untuk

memperoleh pekerjaan. Beberapa masalah yang terkait ketenaga kerjaan adalah :

1. Kurangnya lapangan kerja
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak. Beberapa permasalahan pemerintahan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas

1. Pemberdayaan perempuan belum optimal
2. Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas

3. Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Beberapa permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum adanya regulasi ketahanan pangan
2. Masih banyaknya daerah yang rawan pangan
3. Belum tersedianya sumber-sumber pangan lokal
4. Masih tingginya ketergantungan terhadap pangan luar
5. Belum optimalnya pengelolaan pangan
6. Belum optimalnya pendistribusian pangan
7. Masih rendahnya keanekaragaman pangan

4. Pertanahan

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dan kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki data tentang pertanahan, berupa data administrasi kepemilikan lahan di wilayahnya. Beberapa permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

2. Tingginya konflik tenurial

5. Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Beberapa permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih rendahnya penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

2. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

3. Masih rendahnya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

4. Belum optimalnya pengelolaan kawasan lindung

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam menilai tertib administrasi kependudukan indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK, akte kelahiran dan akta nikah.

Beberapa permasalahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki kartu administrasi

2. Masih rendahnya tertib administrasi dan catatan sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai sarana berorganisasi, berbagi informasi, penyaluran aspirasi serta peningkatan pengetahuan /kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya (Desa dan Dusun), sedangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam

pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah (masyarakat) serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Beberapa permasalahan pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum optimalnya peran kelembagaan
2. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat pedesaan
3. Terbatasnya alternatif lapangan pekerjaan
4. Rendahnya akses terhadap permodalan
5. Rendahnya akses terhadap ketersediaan sarana dan prasarana
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
7. Belum optimalnya penataan desa
8. Belum optimalnya penggalan dan pengelolaan potensi ekonomi desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menyebabkan rendahnya angka keluarga sejahtera. Kurangnya sosialisasi tentang keluarga berencana juga menjadi pemicu belum terlaksananya program setiap keluarga memiliki anak dua.

9. Perhubungan

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bagian Barat Pulau Sumatera merupakan gugusan pulau yang memanjang arah Barat Daya-Tenggara berada di Samudera Indonesia. Keberadaan Kepulauan Mentawai sebagai gugusan kepulauan menjadi permasalahan tersendiri dalam transportasi orang dan barang. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dalam pulau, antar pulau dan keluar kabupaten menjadi tantangan bagi perkembangan kemajuan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat mengandalkan jalur transportasi laut dalam menghubungkan Kepulauan Mentawai dengan daratan Sumatera dan antar pulau di Kepulauan Mentawai sendiri. Namun kondisi angkutan laut yang relatif masih terbatas, dimana permasalahan adalah masih rendahnya frekuensi layanan angkutan laut reguler antar

pulau. Hal ini menjadi permasalahan dalam percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hubungan Kepulauan Mentawai dengan ibukota provinsi dapat dilayani dengan dua jenis moda yaitu angkutan laut dan udara. Untuk angkutan udara, Pelabuhan udara hanya terdapat di Rokot (Kecamatan Sipora Utara), dapat didarati pesawat-pesawat kecil (Twin Otter, dan sejenisnya), dan hingga saat ini hanya ada satu pesawat yang digunakan dengan jadwal penerbangan yang terbatas. Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya melayani penerbangan lokal dari/ke Padang, yakni dilayani oleh penerbangan perintis. Frekuensi penerbangan pada tahun 2014 adalah 3 kali per minggu. Kondisi sarana dan prasarana transportasi udara yang terbatas menyebabkan terbatas pula maskapai penerbangan yang memanfaatkannya. Bandara Rokot dan beberapa pelabuhan laut di Kepulauan Mentawai belum berfungsi penuh, sehingga alokasi dana untuk pembangunan selama ini belum optimal pemanfaatannya. Pembangunan juga belum diserasikan dengan prasarana pendukung lainnya (jalan dan jembatan). Karena terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kepulauan Mentawai baik internal ataupun dari dan ke Kepulauan Mentawai, mengakibatkan rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam pergerakan internal dan eksternal di Kepulauan Mentawai.

Aksesibilitas yang rendah mengakibatkan terbatasnya pergerakan orang dan barang di dan ke Kepulauan Mentawai. Hasil sumber daya alam ataupun produksi dari masyarakat kurang dapat dipasarkan keluar Mentawai, aksesibilitas yang rendah disebabkan juga oleh tingginya biaya transportasi dalam dan keluar Kepulauan Mentawai. Tingginya biaya transportasi mengakibatkan rendahnya mobilitas masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik untuk perjalanan dalam rangka tujuan perekonomian (pergerakan barang dan jasa) ataupun pergerakan untuk tujuan lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya harga bahan bakar kendaraan dan kapal. Selain itu harga bahan bakar yang berfluktuasi, yang disebabkan oleh pasokan atau ketersediaan jumlah bahan bakar yang tidak tetap.

Beberapa permasalahan Perhubungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi darat laut dan udara
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung transportasi darat laut dan udara

10. Komunikasi dan Informatika.

Keberadaan sarana informasi dan komunikasi pada setiap SKPD yang memadai sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah serta sebagai sarana koordinasi internal dan eksternal antar SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keberadaan sarana ini juga diperlukan masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Masih banyaknya daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi merupakan salah satu masalah yang harus ditindaklanjuti. Dari 10 kecamatan yang ada baru 7 kecamatan yang mempunyai jaringan komunikasi dan itupun hanya menjangkau daerah kecamatan saja dan tidak menjangkau sampai ke pelosok desa dan dusun.

Beberapa permasalahan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum merata ketersediaan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana broadband
3. Belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio

11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sedikit jumlah koperasi aktif, dan merupakan koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,

karena dapat meningkatkan jumlah UMKM yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa permasalahan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih sedikit jumlah koperasi aktif, dan merupakan koperasi simpan pinjam.
2. Rendah kualitas SDM pengelola koperasi

12. Penanaman Modal.

Investasi (penanaman modal) memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Untuk meningkatkan daya Tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah daerah perlu melakukan promosi tentang daerahnya serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dapat berdampak pada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kepulauan Metawai. Beberapa permasalahan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya penanaman modal baik oleh PMA maupun PMDN
2. Belum optimalnya regulasi dan pelayanan perizinan satu pintu

13. Kepemudaan dan Olah Raga;

Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah. Tidak adanya organisasi pemuda yang dibina oleh pemerintah daerah merupakan salah satu permasalahan pada bidang pemuda. Pada bidang olahraga. Beberapa permasalahan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan

3. Rendahnya semangat juang generasi muda
4. Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA di kalangan generasi muda
5. Rendahnya prestasi di bidang olahraga
6. Rendahnya sarana dan prasarana keolahragaan
7. Rendahnya even-even kepemudaan dan olahraga
8. Belum optimalnya fungsi-fungsi organisasi kepemudaan dan keolahragaan

14. Statistik.

Dokumen statistik suatu daerah diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa permasalahan Statistik di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi
2. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi yang benar

15. Persandian.

Persandian merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, berfungsi untuk pengamanan informasi. Ini merupakan tantangan yang berat karena masih belum diterapkan secara maksimal. Beberapa masalah terkait persandian adalah :

1. SDM yang belum berkompentensi untuk mengamankan informasi penting dan rahasia.
2. Masih kurang optimalnya dukungan layanan operasional persandian untuk kemandan informasi.

16. Kebudayaan.

Masalah pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah semakin terkikisnya sistem sosial budaya masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan Kepulauan Mentawai menyebabkan semakin

ramai pendatang untuk menetap dan mencari pekerjaan di daerah ini. Implikasinya jelas, yaitu terjadinya pembauran nilai sosial budaya dalam masyarakat di Mentawai. Namun, dalam proses pembauran tersebut, justru sistem sosial budaya masyarakat Mentawai semakin terpinggirkan. Masyarakat lokal terpengaruh dengan nilai luar yang dominan dan dianggap modern.

Padahal nilai luar tersebut belum tentu sesuai, terutama dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dalam banyak hal, masyarakat justru belum dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai dasar interaksi diantara mereka sehingga peran masyarakat Mentawai menjadi marjinal hampir di segala bidang. Apalagi dalam konteks tertentu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem sosial budaya lokal sebagai basis dalam penyelenggaraan Fungsi pemerintahan. Padahal dengan memanfaatkan sistem sosial budaya ini membawa dampak pada peningkatan partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalah lain yang juga menjadi masalah dalam upaya melestarikan adat tradisi masyarakat Mentawai ini adalah rendahnya perhatian generasi muda setempat untuk mengamalkan nilai budaya ini. Padahal pewarisan nilai sosial budaya kepada generasi muda ini adalah salah satu cara untuk melestarikan adat tradisi ini secara turun temurun. Ini jelas implikasi dari kuatnya penetrasi nilai luar baik yang sengaja dibawa oleh pendatang maupun akibat pembauran yang dilakukan secara kontiniu antar komunitas masyarakat. Lebih jauh yang juga harus menjadi perhatian untuk melestarikan sistem sosial budaya masyarakat Mentawai ini adalah lemahnya negosiasi yang dilakukan dengan pihak penanam modal yang cenderung mengabaikan keberadaan sistem sosiobudaya masyarakat Mentawai ini. Oleh karena itu, sebagai bagian strategi untuk melestarikan sistem sosial budaya ini, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dapat menguatkan nilai sosial budaya tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten dapat menjadikan sistem sosial budaya ini sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan investasi yang tidak hanya menguntungkan pengusaha tapi juga masyarakat setempat. Kebudayaan Mentawai sebenarnya karena

mempunyai tipe budaya yang memiliki keunikan yang memperkuat keserasian tinggi antara ekologi dan manusia. Keberadaan masyarakat Mentawai asli ditengah perkembangan modernisasi yang masuk ke dalam sendi-sendi perilaku dan norma budaya lokal, membuat banyak orang Mentawai terpengaruh untuk mengubah gaya hidup mereka. Padahal, pola kehidupan tradisional yang dipraktekkan masih menjadi kekuatan dari eksistensi Mentawai dalam berhadapan dengan masyarakat lain. Perkembangan interaksi sosial melalui pembauran dalam perkawinan (amalgamasi) adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Mentawai untuk memilih mempertahankan atau meleburkan identitas budaya mereka ke dalam budaya masyarakat lain yang berbeda. Beberapa permasalahan Statistik di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Belum adanya regulasi tentang masyarakat hukum adat
2. Menurunnya nilai-nilai sosial budaya di generasi muda
3. Menurunnya pemahaman kebangsaan
4. Rendahnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya

17. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan milik daerah dapat menunjukkan tingkat pelayanan pada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat umum serta kelangsungan pelayanan pendidikan. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki gedung perpustakaan, sehingga pelayanan diberikan pada kantor kepastakaan dan tidak memadai. Jumlah kunjungan juga sangat rendah. Selain itu masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan pada kantor kepastakaan untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup. Beberapa permasalahan Perpustakaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya minat baca masyarakat
2. Rendahnya sarana dan prasarana kepastakaan

1.1.2 Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. Kelautan dan Perikanan

Masih kurangnya keterampilan pemanfaatan teknologi eksplorasi hasil laut, menyebabkan nilai tambah hasil perikanan belum memberikan hasil yang maksimal baik terhadap daerah maupun mereka yang terlibat langsung dalam mengelola hasil laut seperti nelayan. Di samping itu, kelembagaan yang ada juga tidak mampu mendorong nelayan dan masyarakat pesisir untuk berkembang lebih baik, selanjutnya belum berkembangnya teknologi pengolahan ikan dan rumput laut juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor kelautan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Permasalahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas perikanan
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan (perikanan dan kelautan);
3. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut
4. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan
5. Rendahnya pengawasan ilegal fishing dan pengrusakan ekosistem laut
6. Rendahnya pengelolaan hasil-hasil perikanan dan kelautan
7. Rendahnya sarana dan prasarana produksi perikanan
8. Rendahnya jaringan pemasaran perikanan
9. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil

2. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum banyak mengalami perkembangan, walaupun secara potensial pengembangan ekowisata (budaya dan kenakeragaman hayati) cukup besar. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik secara nasional yang masih belum pulih dari krisis, *networking* yang belum terfasilitasi dan terkelola

dengan baik, sumber daya pengelola pariwisata yang masih rendah, sehingga daya tarik terhadap pariwisata masih rendah. Selain itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dampak ekonomi pengembangan wisata belum dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai tujuan wisata utama di antara 52 daerah di Indonesia dan merupakan 5 (lima) daerah teraman sebagai lokasi/tujuan wisata di Indonesia. Untuk itu, kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah membangun dan mengembangkan sektor kepariwisataan secara terpadu dengan memaksimalkan berbagai potensi pariwisata baik yang ada di darat, sungai, pantai, laut maupun pulau-pulau kecil untuk ditata, dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional. Beberapa Permasalahan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya pengembangan destinasi pariwisata
2. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata
3. Rendahnya kapasitas pelaku pariwisata
4. Rendahnya sarana dan prasarana pariwisata
5. Rendahnya promosi pariwisata

3. Pertanian

Sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, belum meratanya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran sektor pertanian menyebabkan sektor ini masih belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi terhadap sektor pertanian dan sub sektor perikanan dan peternakan dengan membangun integrasi sektor hulu dengan sektor industri pengolahan, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar perlu dilaksanakan. Pendekatan agribisnis maupun agroindustri bisa dijadikan prioritas utama pembangunan, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap penguatan basis ekonomi kerakyatan. Upaya diversifikasi produksi pertanian, peningkatan. Nilai tambah komoditas pertanian dan perluasan pemasaran terutama terhadap

komoditas yang dibudidayakan akan menjadi prioritas pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan ekonomi secara umum. Transformasi ini sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian dan lingkungan. Beberapa Permasalahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya Produksi dan produktivitas pertanian
 2. Belum terarahnya komoditas pertanian lokal
 3. Rendahnya produksi pertanian
 4. Belum berkembangnya industri pertanian (off farm)
 5. Belum berkembangnya agribisnis yang berorientasi pasar
 6. Pola pertanian masyarakat yang masih subsistem
 7. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani
4. Kehutanan

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki cagar biosfir nasional yang terletak di Pulau Siberut. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya, seperti rendahnya apresiasi pemerintah terhadap pengelolaan hutan lestari. Beberapa permasalahan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan sehingga memberikan ancaman bagi pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi (Taman Nasional Siberut)
 2. Pembangunan kehutanan berkelanjutan belum terwujud;
 3. Belum adanya kebijakan yang mendukung pengembangan cagar biosfir.
 4. Rendahnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan nilai ekonomi hutan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan infrastruktur lainnya yang ada di Kepulauan Mentawai adalah masalah kekurangan suplai tenaga listrik yang membuat daya saing investasi daerah menjadi sangat rendah. Listrik merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Permasalahan kurangnya pasokan energi listrik membuat terhambatnya perkembangan dunia usaha, industri

dan rumah tangga pada pusat kegiatan yang ada di Kepulauan Mentawai. Peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai perlu dilakukan secepatnya mengingat kebutuhan akan sumber energi listrik semakin tinggi dikalangan dunia usaha dan industri. Salah satu penyebab kurangnya pasokan suplai tenaga listrik adalah masih kurangnya pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan seperti energi biomassa dan air.

Beberapa permasalahan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya elektrifikasi masyarakat
2. Belum berkembangnya energi baru terbarukan

6. Perdagangan

Jumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat kurang, dan pasar yang ada juga belum dapat difungsikan secara optimal. Hal ini menyebabkan produk-produk yang dihasilkan tidak dapat di promosikan secara optimal. Beberapa permasalahan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Masih rendahnya jumlah pusat/sentra perdagangan
2. Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk unggulan
3. Tingginya indeks kemahalan barang-barang
4. Rendahnya distribusi perdagangan dalam pulau dan antar pulau
5. Rendahnya pengawasan terhadap aktifitas perdagangan

7. Perindustrian

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2010 masih didominasi bidang pertanian (lebih dari 53 persen sumbangan PDRB nya dari sektor pertanian). Namun demikian, masih ditemukan banyaknya petani yang belum melakukan pengolahan terhadap hasil produk pertanian dan kehutanan yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh karena belum dikembangkannya teknologi pengolahan hasil pertanian kepada keluarga/rumah tangga. Di samping itu, juga diamati kondisi lemahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan berskala kecil menengah, dan skema

permodalan belum mendukung pengolahan hasil pertanian. Beberapa permasalahan perindustrian di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum berkembangnya industri kecil menengah pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan;
2. Belum berkembangnya pembinaan kelompok pengrajin
3. Rendahnya daya saing hasil-hasil produksi

8. Transmigrasi

Beberapa permasalahan transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Ekonomi masyarakat di daerah transmigrasi yang belum berkembang
2. Masih kurangnya rasa gotong royong dengan penduduk asli setempat yang berpotensi menimbulkan konflik

3.2 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan, nasional dan daerah lainnya di sekitar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Isu Strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 20 tahun ke depan.

3.2.1 Penelaahan Isu-isu strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Perumusan isu strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggung jawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lainnya tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional (SDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Sumatera Barat)
1	Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya	Mengurangi jumlah penduduk miskin	Penanggulangan kemiskinan
2	Mengakhiri kelaparan meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan produksi pertanian untuk penyediaan suplai bahan pangan
3	Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kesakitan dan kematian • Menurunkan angka kematian bayi 	Pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar
4	Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan 	
5	Meraih persamaan gender dan memperkuat perempuan dewasa dan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kematian ibu melahirkan • Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 	
6	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua		
7	Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua		
8	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus inklusif, berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif dan layak bagi semua	Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Meningkatkan daya saing baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya manusia
9	Membangun infrastruktur yang berdaya tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi	Pemerataan pembangunan	
10	Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara	Menurunkan pertumbuhan penduduk	
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif aman, berdaya tahan dan berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan	Keterbatasan prasarana terhadap akses wilayah

No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional (SDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Sumatera Barat)
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan		
13	Menciptakan udara yang bersih		
14	Memastikan kondisi bawah laut dan keadaan terumbu karang, hutan mangrove, tidak mengalami kerusakan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat	
15	Kehidupan diatas permukaan tanah berjalan sesuai dengan ekosistem		
16	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan	Pembangunan jati diri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa , nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air	Keseimbangan hidup antara agama dan budaya
17		Meningkatkan profesionalisme birokrasi	
18		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	
19		Pentapan Mentawai sebagai Kawasan strategis pariwisata	
20		Penetapan Tmana Nasional Siberut	
21		Penetapan Sikakap sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan	
22		Penetapan 3 Pulau Mentawai sebagai pulau terluar	

3.2.2 Penelaahan Isu-Isu Startegis pada RPJP Daerah Lain

Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan RPJPD daerah lain diperlukan karena adanya persamaan kepentingan tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya didaerah perbatasan dua wilayah) serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan

wilayah/kawasan pembangunan. Kebutuhan keterpaduan rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kabupaten daerah lain yang perlu dibangun dalam jangka panjang Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berbentuk kepulauan dan tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lainnya tidak dimungkinkan dibuat suatu konsep keterpaduan dalam rencana pembangunan karena batas antar daerah berupa laut lepas.

3.2.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau Kepala Bappeda. Panduan itulah yang akan digunakan tim perencana dalam mengkompilasi berbagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis bagi daerah. Suatu isu strategis dapat berlaku umum untuk sebagian besar daerah. Namun, sebagian lainnya, isu strategis hanya berlaku bagi satu daerah tertentu saja karena kekhasan, tantangan, dan peluang yang berbeda tiap daerah. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan

pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka panjang daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten kepulauan Mentawai serta isu-isu strategis jangka panjang internasional, nasional serta Regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005–2025 sebagai berikut :

1. Tingginya kesenjangan wilayah baik di dalam pulau maupun antar daerah juga kesejangan sosial seperti pendapatan
2. Masuk kategori daerah tertinggal
3. Masuk kategori daerah terluar
4. Merupakan daerah rawan bencana
5. Tingkat kemiskinan yang tinggi
6. Daya saing yang rendah
7. Kualitas sumber daya manusia rendah
8. Tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah rendah
9. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan
10. Belum berkembangnya energi baru terbarukan
11. Belum berkembangnya industri kecil menengah
12. Memiliki potensi pengembangan pariwisata yang besar tetapi belum terkelola dengan baik

13. Pertanian yang masih berpola subsistem belum terarah (agribisnis)
14. Belum optimalnya pemanfaatan ruang
15. Rendahnya pengembangan jati diri berbasis budaya lokal
16. Merupakan daerah kepulauan/maritim

Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.2
Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Sumatera Barat)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
1	Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya	Mengurangi jumlah penduduk miskin	Penanggulangan kemiskinan	Tingkat kemiskinan yang tinggi
2	Mengakhiri kelaparan meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Mendukung ketahanan pangan didaerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan produksi pertanian untuk penyediaan suplai bahan pangan	Pertanian yang masih berpola subsistem belum terarah (agribisnis)
3	Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kesakitan dan kematian • Menurunkan angka kematian bayi 	Pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar	
4	Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan 		Kualitas sumber daya manusia rendah
5	Meraih persamaan gender dan memperkuat perempuan dewasa dan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan angka kematian ibu melahirkan • Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 		
6	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua			
7	Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjut dan modern bagi semua			Belum berkembangnya energi baru terbarukan
8	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus inklusif,	Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan	Meningkatkan daya saing baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya	Daya saing yang rendah

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Sumatera Barat)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif dan laik bagi semua	ekonomi yang tinggi	manusia	
9	Membangun infrastruktur yang berdaya tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi	Pemerataan pembangunan		Belum berkembangnya industri kecil menengah
10	Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara	Menurunkan pertumbuhan penduduk		<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kesenjangan wilayah baik di dalam pulau maupun antar daerah juga kesenjangan sosial seperti pendapatan • Merupakan daerah tertinggal
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif aman, berdaya tahan dan berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayan	Keterbatasan prasarana terhadap akses wilayah	
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan			
13	Menciptakan udara yang bersih			
14	Memastikan kondisi bawah laut dan keadaan terumbu karang, hutan mangrove, tidak mengalami kerusakan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat		Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan
15	Kehidupan diatas permukaan tanah berjalan sesuai dengan ekosistem			Merupakan daerah rawan bencana
16	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan	Pembangunan jati diri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa ,	Keseimbangan hidup antara agama dan budaya	Rendahnya pengembangan jati diri berbasis budaya lokal

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Sumatera Barat)	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air		
17		Meningkatkan profesionalisme birokrasi		Tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah rendah
18		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		Belum optimalnya pemanfaatan ruang
19		Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Siberut dan Sipora		Potensi pengembangan pariwisata yang besar
20		Penetapan Taman Nasional Siberut		
21		Sentra Kelautan dan Perikanan Sikakap		Merupakan daerah kepulauan / maritime
22		Penetapan 3 Pulau Mentawai sebagai pulau terluar		Daerah terluar

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Hasil perumusan visi Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

Visi :

Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”

Tabel 4.1
Perumusan Visi

No	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Maritim	kepulauan, kelautan, bahari, pelayaran, kepariwisataan	“Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”
2	Terkemuka	maju, aman, sejahtera, makmur, tertib, serasi	

Tabel 4.2
Penjelasan Visi

VISI	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”	kepulauan, kelautan, bahari, pelayaran dan kepariwisataan	Keadaan/kondisi suatu daerah berada dalam kawasan teritorial laut yang luas, dimana ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis, mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya ataupun kewenangannya.
	maju, aman, sejahtera, makmur, tertib, serasi	Semua kegiatan usaha berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan gratis untuk keluarga miskin, infrastruktur yang memadai sehingga penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai sehat jasmani dan rohani, aman dan berdaya saing.

Terkait visi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 yaitu: “Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025” memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional tahun 2025, yaitu: Indonesia yang mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yaitu : Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025.

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholder pembangunan secara keseluruhan. Misi merupakan hal penting dirumuskan untuk membantu untuk menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang ingin dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam tahapan 4 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur.

Tabel 4.3
Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Visi	Misi	
"Menjadi Kabupaten Maritim Yang Berkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025"	1	Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
	2	Mewujudkan Masyarakat maritim Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan
	4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

Tabel 4.4
Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Misi Jangka Panjang Nasional Dan Provinsi Sumatera Barat

Misi RPJP Nasional	Misi RPJP Provinsi Sumatera Barat	Misi RPJP Kabupaten Kepulauan Mentawai
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya, berdasarkan filosofi " adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah "	Mewujudkan Masyarakat maritim Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu		
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum		
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu berdaya saing di dunia global	

Misi RPJP Nasional	Misi RPJP Provinsi Sumatera Barat	Misi RPJP Kabupaten Kepulauan Mentawai
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah, dan berdaya saing tinggi	Mewujudkan Masyarakat maritim Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang
	Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik	Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Rumusan misi “mewujudkan pemerintahan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan” ditempatkan pada urutan misi yang pertama dalam seluruh rangkaian misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai karena pemerintah (Negara) merupakan otoritas tertinggi yang menjadi aktor utama pembangunan. Segala sumberdaya yang dibutuhkan untuk pembangunan terkonsentrasi pada Negara. Dengan kata lain, segala sumberdaya yang melekat pada Negara itulah yang menjadi rasionalitas bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembangunan.

Tujuan pembangunan adalah kesejahteraan bagi warga negara. Negara dalam hal ini merupakan ujung tombak pembangunan tersebut, sedangkan pembangunan dapat terlaksana dengan baik ketika sebuah organisasi pemerintahan daerah mampu menjalankan fungsi- fungsinya. Inilah titik krusial misi pertama dimana mewujudkan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan menjadi prasyarat utama atau fondasi bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dua puluh tahun ke depan. Asumsinya, dengan hadirnya pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya, maka proses pembangunan dapat berlangsung.

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Yang Berbasis Maritim Dan Berkelanjutan

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan daerah di bidang pariwisata, perikanan, pertanian peternakan.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan daya dukung daerah dan fungsi ruang.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 : Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
Sasaran :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien
Sasaran :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
 - b. Peningkatan sinergitas tata kelola pemerintahan

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tujuan Misi 2 :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi

Sasaran :

- a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran :

- a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesehatan Ibu dan anak
- c. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.

Sasaran :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Peningkatan prestasi generasi muda
4. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja

Sasaran

- a. Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat
- b. Pembangunan sistem inovasi daerah
5. Terkendalinya urbanisasi

Sasaran :

- a. Pengendalian laju urbanisasi

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Yang Berbasis Maritim Dan Berkelanjutan

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

Sasaran :

- a. Pengelolaan pariwisata berkelas dunia
- b. Pengelolaan Pertanian terpadu
- c. Pengelolaan Sumber daya laut
- d. Pembangunan industri berbasis rumah tangga
- e. Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri
- f. Transformasi struktur perekonomian daerah dari agraris ke sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa

2. Pembangunan kehutanan disertai dengan perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran :

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari
 - b. Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan
3. Meningkatnya investasi daerah

Sasaran :

- a. Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif
- b. Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar

Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

Tujuan misi 4 adalah :

1. Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana

Sasaran :

- a. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana
 - b. Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang saling menguntungkan melalui pengembangan wilayah
2. Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran :

- a. Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - b. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin
3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya

Sasaran :

Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005-2025 adalah : “Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai 20 tahun mendatang. Sasaran pokok merupakan langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan paduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari suatu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 5.1
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Profesional	1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	1. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN 2. Meningkatkan disiplin pegawai
		2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	1. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan kinerja 2. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja 3. Pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja 4. Seluruh pelayanan publik memiliki SOP dan SPM 5. Memperbaiki sistem pelayanan publik / perizinan kearah

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			<p>pelayanan yang lebih sederhana, transparan dan pasti</p> <p>6. Membangun sistem tata kelola pemerintahan dengan aplikasi e-goverment</p>
	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	<p>1. Membangun sistem perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, partisipatif dan transparan</p> <p>2. Membangun sistem Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang efektif</p> <p>3. Memperkuat sistem pengawasan (SPIP);</p>
		2. Peningkatan sinergitas tata kelola pemerintahan	<p>1. Membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang efektif dan efisien berciri kepulauan (SOTK)</p> <p>2. Mengembangkan kerjasama pemerintah dengan swasta</p>
	3. Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	<p>1. Penyusunan akuntabilitas kinerja yang terukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap instansi OPD</p> <p>2. Nilai Opini WTP atas LKPD</p>
Misi II. Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	<p>1. Pengembangan pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi</p> <p>2. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin berprestasi sampai pendidikan tinggi</p> <p>3. Pendidikan gratis SD-SMP</p> <p>4. Meningkatkan budaya literasi masyarakat</p>

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			5. Sekolah Inti 1 setiap Kecamatan untuk setiap jenjang pendidikan 6. Mendorong Pendirian Perguruan Tinggi/Politeknik 7. Wajib Belajar 12 Tahun
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kesehatan Ibu dan anak 3. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat	1. Penyediaan sarana dan kesehatan yang merata dan berkualitas 2. Penyediaan tenaga kesehatan yang profesional 3. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat 100 persen 1. Pemberian makanan tambahan dan vitamin serta pemeriksaan tumbuh kembang anak balita 2. Pemberian imunisasi dasar lengkap 3. Pemberian asuhan ante natal care dan post natal care kepada ibu hamil melahirkan 1. Promosi prilaku hidup bersih dan sehat 2. Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
	3. Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 2. Peningkatan prestasi generasi muda	1. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 2. Mendorong partisipasi dan peberdayaan masyarakat di dalam pembangunan 3. Terbentuknya masyarakat Hukum adat 1. Pemberdayaan dan Pembinaan pemuda dalam pembangunan
	4. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	1. Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	1. Pengembangan pendidikan life skill/vokasional 2. Pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship)

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			<p>melalui pelatihan dan pemberian modal kerja (start up)</p> <p>3. Pelatihan bagi calon pekerja (magang)</p>
		2. Pembangunan sistem inovasi daerah	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan</p> <p>2. Pembangunan technopark</p>
	5. Terkendalinya urbanisasi	1. Pengendalian laju urbanisasi	<p>2. Membuka lapangan kerja di desa</p> <p>3. Pembangunan agroindustri di desa</p>
Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dan transformasi struktur perekonomian	1. Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	<p>1. Membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata</p> <p>2. Membangun pariwisata berbasis masyarakat</p>
		2. Pengelolaan Pertanian terpadu	1. Pembangunan agroindustri dan agribisnis terpadu berdasarkan keunggulan masing-masing pulau serta pemasaran hasilnya
		3. Pengelolaan Sumber daya laut	1. Pengembangan kelautan dan perikanan terpadu melalui optimalisasi dan modernisasi pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan
		4. Pembangunan industri berbasis rumah tangga	1. Memberikan permodalan dan pelatihan usaha
		5. Pengelolaan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes yang mandiri	<p>1. Mendorong sektor informal ke sektor formal dengan kemudahan fasilitas perizinan</p> <p>2. Pembangunan BUMDes dan BUMD untuk sektor-sektor strategis</p> <p>3. Membangun jaringan pasar regional nasional dan internasional</p> <p>4. Mendorong penyediaan pembiayaan melalui</p>

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
			pendirian bank/BPR di setiap kecamatan
	2. Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	1. Pembentukan hutan adat dan hutan kemasyarakatan 2. Pemanfaatan Hutan Mangrove untuk objek pariwisata dan penelitian
		2. Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan 2.
	3. Meningkatnya investasi daerah	1. Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	1. Memberikan fasilitas kemudahan perizinan 2. Menyiapkan bank tanah 3. Memberikan insentif terhadap investor
		2. Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	1. Meningkatkan alokasi APBD untuk belanja modal diatas 70% 2. Membangun BLUD dan BUMD untuk sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar
Misi IV ; Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang;	1. Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana	1. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	1. Pembangunan jalan poros utama (trans Mentawai) 2. Pembangunan jalan lingkaran di setiap pulau (lokal sekunder) 3. Pembangunan jalan ke pusat-pusat pertumbuhan 4. Pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan 5. Pembangunan bandara Pei-pei, Rokot, dan Minas 6. Pembangunan dan pengelolaan air baku 7. Pembangunan energi 8. Pembangunan telekomunikasi dan informatika
		2. Terciptanya	1. Pengembangan desa

Misi	Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan
		hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang saling menguntungkan melalui pengembangan wilayah	dan kota yang saling ketergantungan untuk menghilangkan terjadinya enclave dengan cara membangun link and match komoditi pertanian dan industri 2. Pengembangan sistem moda transportasi lokal berbasis kepulauan 3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	2. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	1. Pendidikan gratis 9 tahun 2. Memberikan beasiswa miskin 3. Memberikan jaminan kesehatan miskin 4. Memberikan jaminan persalinan untuk masyarakat miskin
		2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	1. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam usaha-usaha produktif 2. Memberikan akses permodalan
	3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	1. Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	1. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan 2. Akses sanitasi dan air bersih 100 0 100 3. Memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 4. Menyiapkan KASIBA dan LISIBA 5. Mendorong pengembang untuk mendapatkan akses pembiayaan 6. Membangun ruang terbuka hijau di setiap kawasan pemukiman

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten

Kepulauan Mentawai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penagturan waktu dan pengadaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun harus tetap berkesinambungan dari satu periode.

Tabel 5.2
Prioritas Pembangunan Dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Prioritas Pembangunan			
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Pembangunan di berbagai bidang yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan Penyediaan infrastruktur	Pembangunan Kualitas prasarana dan sarana fisik maupun non-fisik dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan pengembangan prasarana dan sarana fisik maupun non-fisik dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi maritim	Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri berbasis maritim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga terwujud Kabupaten maritim terkemuka di pantai Barat Sumatera

Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJPD) merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan terkait lainnya, maka perumusan arah pembangunan jangka panjang dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025 ini. Arah pembangunan jangka panjang menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh setiap upaya pembangunan daerah yang akan dilakukan. Sementara, pentahapan pembangunan merupakan skala prioritas atau tekanan pembangunan daerah yang harus dilakukan untuk tiap-tiap periode lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan semula. Dengan adanya arah dan pentahapan pembangunan kabupaten ini, RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025 ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang peta perjalanan (*road map*) arah dan sasaran pembangunan kabupaten yang ingin dicapai selama periode 20 tahun ke depan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah “Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, ditetapkan pula 4 misi utama pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan, maka dilakukan berbagai kebijakan melalui sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah memerlukan beberapa tahapan kebijakan dan prioritas program yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan kebijakan dan prioritas program yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan yang perlu diselesaikan sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Oleh karena itu, penekanan kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan dalam jangka lima tahun berbeda-beda, namun antar tahapan memiliki kesinambungan sesuai dengan masing-masing arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan pada masing-masing tahapan jangka waktu lima tahun dilakukan dengan memfokuskan pada setiap sasaran kebijakan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan masing-masing. Adapun masing-masing tahapan kebijakan disusun sebagai penjabaran arah kebijakan pembangunan.

Pentahapan dan skala prioritas pembangunan tersebut, nantinya akan dirinci lebih lanjut untuk tiap-tiap arah pembangunan, sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap RPJMD dapat diketahui. Dengan demikian, peta jalan (*road map*) pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang daerah akan dapat dilihat dengan jelas.

Tabel 5.3
Tahapan dan Prioritas Kebijakan Pembangunan

VISI : “Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025”

Misi 1 : Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	1. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN 2. Meningkatkan disiplin pegawai	1. Rekrutmen aparatur sesuai dengan kompetensi; 2. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai; 3. Pelayanan kepada masyarakat; 4. Menyusun fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.	1. Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi; 2. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai ; 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 5. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas	1. Evaluasi pegawai sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi; 3. Pengembangan kapasitas aparatur; 4. Pengembangan sistem informasi kepegawaian; 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi kepegawaian; 6. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing. 7. Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan bagi	1. Pengembangan kapasitas aparatur; 2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian; 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi kepegawaian; 4. Pengembangan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur pemerintah; 5. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi aparatur berprestasi secara selektif sesuai kebutuhan;	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh ASN S1 (Sarjana)

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
				<p>6. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing.</p>	<p>8. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi aparatur berprestasi;</p> <p>9. Peningkatan disiplin pegawai;</p> <p>10. Penerapan regulasi tentang disiplin di seluruh Perangkat daerah;</p> <p>11. Peningkatan kesejahteraan aparatur;</p> <p>12. Peningkatan dan Penguatan kinerja aparatur;</p>	<p>6. Peningkatan disiplin pegawai;</p> <p>7. Monitoring Penerapan regulasi tentang disiplin di seluruh Perangkat daerah;</p> <p>8. Peningkatan kesejahteraan aparatur;</p> <p>9. Peningkatan dan Penguatan kinerja aparatur</p>	
	2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah	<p>1. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan kinerja</p> <p>2. Pemberian tunjangan kinerja</p>	<p>1. Penyusunan dan penerapan Analisa Jabatan dan analisa beban kerja;</p> <p>2. Penyusunan dan Penerapan regulasi tentang penilaian kinerja ASN;</p> <p>3. Pemberian</p>	<p>1. Penyusunan dan penerapan Analisa Jabatan dan analisa beban kerja;</p> <p>2. Penyusunan dan Penerapan regulasi tentang penilaian kinerja ASN;</p> <p>3. Pemberian penghargaan kepada</p>	<p>1. Evaluasi Penyusunan dan penerapan Analisa Jabatan dan analisa beban kerja;</p> <p>2. Penyusunan dan Penerapan regulasi tentang penilaian kinerja ASN;</p> <p>3. Penerapan kebijakan</p>	<p>1. penerapan dan pengembangan Analisa Jabatan dan analisa beban kerja;</p> <p>2. Penerapan dan pengembangan regulasi tentang penilaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Komposisi jabatan fungsional dengan jabatan struktural 70:30 •Terimplementasinya peraturan tentang pemberian insentif dan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			<p>penghargaan kepada aparatur pemerintah yang berprestasi;</p> <p>4. Penindakan tegas kasus-kasus pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> <p>5. Pemberian sanksi bagi aparatur yang menyalahi aturan kepegawaian</p>	<p>aparatur pemerintah yang berprestasi;</p> <p>4. Penindakan tegas kasus-kasus pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> <p>5. Pemberian sanksi bagi aparatur yang menyalahi aturan kepegawaian;</p> <p>6. Penyusunan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin</p>	<p>DIKLAT Berbasis Kompetensi;</p> <p>4. Penerapan metode assessment center;</p> <p>5. Pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja yang objektif;</p> <p>6. Internalisasi Revolusi Mental Bagi Aparatur Pemerintah;</p> <p>7. Pemberian penghargaan kepada aparatur pemerintah yang berprestasi;</p> <p>8. Penindakan tegas kasus-kasus pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> <p>9. Pemberian sanksi bagi aparatur yang menyalahi aturan kepegawaian;</p> <p>10. Penyusunan kembali aturan etika dan mekanisme penegakan</p>	<p>kinerja ASN;</p> <p>3. Penerapan dan pengembangan kebijakan DIKLAT Berbasis Kompetensi;</p> <p>4. Penerapan dan pengembangan metode assessment center;</p> <p>5. Pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja yang objektif;</p> <p>6. Revolusi Mental Bagi Aparatur Pemerintah menjadi budaya kerja;</p> <p>7. Pemberian penghargaan kepada aparatur pemerintah yang berprestasi serta selektif;</p> <p>8. Penindakan tegas kasus-kasus pegawai</p>	<p>disinsentif berdasarkan kinerja aparatur.</p>

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					hukum disiplin.	sesuai dengan aturan yang berlaku; 9. Pemberian sanksi bagi aparatur yang menyalahi aturan kepegawaian. 10. Penyempurnaan dan pengembangan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.	
	3. Meningkatkan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP dan SPM 2. Memperbaiki sistem pelayanan publik / perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan terhadap kinerja aparatur; 2. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang; 3. Pemberantasan praktik KKN; 4. Penguatan Kelembagaan aparatur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan terhadap kinerja aparatur; 2. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang; 3. Pemberantasan praktik KKN; 4. Penguatan Kelembagaan aparatur; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan terhadap kinerja aparatur; 2. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang; 3. Pemberantasan praktik KKN; 4. Penguatan Kelembagaan aparatur; 5. Penerapan Prinsip-prinsip good governance dan clean 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan pengawasan terhadap kinerja aparatur; 2. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang; 3. Pemberantasan praktik KKN; 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua OPD Pelayanan Memiliki dan mengimplementasikan SOP dan SPM • Pengembangan e-government, (e-planning, e-bugeting, e-perizinan, e-health) • Sistem pengawasan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					governance; 6. Pembangunan dan Pemanfaatan e-Government ; 7. Peningkatan akses dan sebaran informasi;	4. Penguatan dan pengembangan Kelembagaan aparatur; 5. Penerapan dan pengembangan Prinsip-prinsip good governance dan clean governance; 6. Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government ; 7. Peningkatan dan pengembangan akses dan sebaran informasi;	dan pengendalian daerah yang meningkat • Administrasi kependudukan yang tertib
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	1. Membangun sistem perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, partisipatif dan transparan	1. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah 2. Penyusunan perencanaan pembangunan	1. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah 2. Penyusunan perencanaan pembangunan	1. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah 2. Peningkatan perencanaan pembangunan	1. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah 2. Pengembangan sistim perencanaan	• Perencanaan pembangunan yang berkualitas

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
		2. Membangun system Pengendalian , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang efektif 3. Membangun sistem pengawasan (SPIP);	daerah yang transparan, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up); 3. Pengendalian perencanaan pembangunan 4. Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan 5. Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan	daerah yang transparan, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up); 3. Pengembangan perencanaan pembangunan berbasis wilayah 4. Penyusunan Sistim Pengendalian perencanaan pembangunan 5. Penyusunan sistim Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan 6. Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar	daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 3. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis IT 4. Penyusunan dan penerapan sistim perencanaan pembangunan berbasis wilayah 5. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah 6. Penyusunan sistim Pengendalian perencanaan pembangunan 7. Penyusunan sistim Evaluasi dan monitoring	pembanguan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 2. Pengembangan sistim perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis IT 3. Pengembangan perencanaan pembangunan berbasis wilayah 4. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah 5. Pengembangan sistim	

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
				pemerintahan 7. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan	perencanaan pembangunan 8. Peningkatan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian perencanaan pembangunan 6. Pengembangan sistim Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan 7. Pengembangan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
	2. Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	1. Membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efektif dan efisien berciri kepulauan (SOTK) 2. Membangun kerjasama	3. Menyempurnakan satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) yang efektif dan efisien	1. Mengevaluasi Membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang efektif dan efisien berciri kepulauan (SOTK) 2. Mengembangkan kerjasama	1. Evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang efektif dan efisien berciri kepulauan (SOTK) 2. Meningkatkan kerjasama pemerintah	1. Pengembangan perangkat organisasi daerah (OPD) yang efektif dan efisien berciri kepulauan (SOTK) 2. Mengembangkan	•Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 – 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
		pemerintah dan swasta		pemerintah dengan swasta dalam pembangunan daerah	dengan swasta dalam pembangunan daerah	kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pembangunan daerah	
3. Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Penyusunan akuntabilitas kinerja yang terukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap instansi OPD 2. Opini WTP atas LKPD	1. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;	1. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;	1. Penyusunan Perjanjian kinerja setiap eselon 2. Penyusunan akuntabilitas kinerja yang terukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap instansi OPD 3. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;	1. Penyusunan Perjanjian kinerja setiap eselon 2. Penyusunan akuntabilitas kinerja yang terukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap instansi OPD 3. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan;	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap OPD memiliki IKU • Nilai akuntabilitas A • Penilaian Opini WTP

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Maju, Sehat, Berbudaya, serta berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi Memberikan beasiswa kepada siswa miskin berprestasi sampai pendidikan tinggi Pendidikan gratis SD-SMP Meningkatkan budaya literasi masyarakat Sekolah Inti 1 setiap Kecamatan untuk setiap jenjang pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan kesejahteraan guru 	<ol style="list-style-type: none"> Mencanangkan Pendidikan Anak Usia Dini; Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Pembangunan pendidikan vokasional Persiapan pendirian Perguruan Tinggi Evaluasi dan Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan kesejahteraan guru Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat; Memberikan beasiswa bagi penduduk miskin Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun; Pengembangan pendidikan vokasional Pendirian Perguruan Tinggi Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan kehumanan Meningkatkan kesejahteraan guru Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat; Memberikan beasiswa bagi penduduk miskin Meningkatkan jumlah sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Wajib belajar SMA 2025 Pendidikan bording di masing-masing SMA kecamatan IPM tertinggi tingkat kabupaten di Pantai Barat Sumatera Pendirian Universitas/ politeknik negeri Beasiswa perguruan tinggi 200 orang pertahun Sekolah Inti 1 setiap Kecamatan untuk setiap jenjang pendidikan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					jumlah sekolah yang terakreditasi 12. Pendidikan gratis SD-SMP	yang terakreditasi 10. Pendidikan gratis SD-SMP	
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Penyediaan sarana dan kesehatan yang merata dan berkualitas 2. Penyediaan tenaga kesehatan yang professional 3. Memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat	1. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;	1. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan uskesmas dengan standar pelayanan dan peralatan internasional (4 puskesmas) 3. Pembentukan BLUD RSUD 4. Pembangunan	1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 2. Pengembangan puskesmas dengan standar pelayanan dan peralatan internasional (4 puskesmas)	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas malaria dan penyakit menular lainnya • Angka harapan hidup 67 tahun • Setiap Pulau ada RS Pratama • Terdapat 4 Puskesmas standar

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					<p>rumah sakit pratama di setiap pulau</p> <p>5. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM tenaga kesehatan</p> <p>6. Upaya kesehatan masyarakat;</p> <p>7. Perluasan jangkauan unit pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal dan terpencil;</p> <p>8. Perbaikan Gizi Masyarakat;</p> <p>9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu;</p> <p>10. Peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil.</p> <p>11. Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat</p>	<p>3. Pengembangan BLUD RSUD</p> <p>4. Peningkatan rumah sakit pratama di setiap pulau</p> <p>5. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM tenaga kesehatan</p> <p>6. Upaya kesehatan masyarakat;</p> <p>7. Perluasan jangkauan unit pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal dan terpencil;</p> <p>8. Perbaikan Gizi Masyarakat;</p> <p>9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu;</p> <p>10. Peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui</p>	<p>Internasional (Silabu, Peipei, Mapeda dan Bosua)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Jaminan kesehatan 100% • Status gizi masyarakat yang meningkat • Obat tersedia lengkap

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
						penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil. 11. Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat	
	2. Meningkatkan kesehatan Ibu dan anak	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian makanan tambahan dan vitamin serta pemeriksaan tumbuh kembang anak balita Pemberian imunisasi dasar lengkap Pemberian asuhan ante natal care dan post natal care kepada ibu hamil melahirkan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk anak sekolah Pemeriksaan tumbuh kembang anak balita Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk anak sekolah Pemeriksaan tumbuh kembang anak balita Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk anak sekolah Pemeriksaan tumbuh kembang anak balita Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi Peningkatan penanganan kesehatan bagi bayi, anak, ibu hamil dan lansia Pemberian asuhan ante natal care dan post natal care kepada ibu hamil melahirkan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk anak sekolah Pemeriksaan tumbuh kembang anak balita Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi Peningkatan penanganan kesehatan bagi bayi, anak, ibu hamil dan lansia Pemberian asuhan ante 	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan sekitar 3000 orang balita pertahun harus mendapatkan asupan gizi seimbang Status kesehatan ibu anak meningkat

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
						natal care dan post natal care kepada ibu hamil melahirkan 6.	
	3. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat	1. Promosi prilaku hidup bersih dan sehat 2. Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan	1. promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.	1. Peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. 2. Peningkatan kesadaran akan PHBS; 3. Penciptaan lingkungan sehat; 4. Penyediaan air bersih untuk rumah tangga per desa 5. Pembangunan sistem sanitasi perkampungan yang lestari	1. Peningkatan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. 2. Peningkatan kesadaran akan PHBS; 3. Penciptaan lingkungan sehat; 4. Penyediaan air bersih untuk rumah tangga per desa 5. Peningkatan sistem sanitasi perkampungan yang lestari	1. Pengembangan promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. 2. Peningkatan kesadaran akan PHBS; 3. Penciptaan lingkungan sehat; 4. Penyediaan air bersih untuk rumah tangga per desa 5. Pengembangan sistem sanitasi perkampungan yang lestari bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi air bersih untuk 755 rumah tangga miskin (755:8 = 95 rumah tangga miskin terpenuhi kebutuhan air bersihnya setiap tahun) • Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
3. Meningkatkan jati diri dan kebanggaan	1. Meningkatkan peran serta masyarakat	1. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan	1. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan	1. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam	Terbentuknya masyarakat Hukum Adat

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
n sebagai masyarakat Mentawai.	dalam pembangunan	2. Mendorong partisipasi dan peberdayaan masyarakat di dalam pembangunan 3. Terbentuknya masyarakat hukum adat	pengambilan keputusan publik	pengambilan keputusan publik 2. Meningkatkan partisipasi dan peberdayaan masyarakat di dalam pembangunan	keputusan publik 2. Meningkatkan partisipasi dan peberdayaan masyarakat di dalam pembangunan 3. Penyusunan regulasi masrakat hukum adat	pengambilan keputusan publik 2. Berkembangnya partisipasi dan peberdayaan masyarakat di dalam pembangunan 3. Pengembangan masyarakat hukum adat	
	2. Meningkatkan prestasi generasi muda	1. Pemberdayaan dan Pembinaan pemuda dalam pembangunan	1. Pelibatan partisipasi pemuda dalam olahraga	1. pembinaan organisasi Kepemudaan; 2. Pembinaan dan Peningkatan prestasi pemuda dalam olahraga	1. Pengembangan dan pembinaan organisasi Kepemudaan; 2. Peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 3. Pembinaan, pengembangan dan Peningkatan prestasi pemuda dalam olahraga	1. Pengembangan dan pembinaan organisasi Kepemudaan; 2. Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 3. Pembinaan, pengembangan dan Peningkatan prestasi pemuda dalam olahraga	• Generasi muda yang berprestasi tingkat nasional
4. Meningkatkan	1. Meningkatkan	1. Pengembangan	1. Pembentukan	1. Peningkatan	2. Peningkatan	1. Pengemba	• 100 orang

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
an produktifitas tenaga kerja	ya mentalitas/ etos kerja masyarakat	life skill 2. Peningkatan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) 3. Pelatihan bagi calon pekerja (magang)	kompetensi tenaga melalui pelatihan kerja	kompetensi tenaga kerja 2. Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; 3. Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.	kompetensi tenaga kerja 3. Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; 4. Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. 5. Penciptaan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran 6. Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja 7. Peningkatan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan	ngan kompetensi tenaga kerja 2. Pengembangan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja; 3. Pengembangan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. 4. Pengembangan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran 5. Pengembangan Pelayanan antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar	wirausahawan muda diciptakan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
						Kerja 6. Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan	
	2. Pembangunan Sistem inovasi daerah	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan 2. Pengembangan technopark	1. Penyediaan sumber data	1. Penyediaan sumber data dan kajian kebijakan	1. Penyusunan sistem inovasi daerah 2. Penyediaan sumber data dan kajian kebijakan 3. Optimalisasi iptek untuk pembangunan 4. Pembangunan kawasan dan zona ekonomi	1. Pengembangan sistem inovasi daerah 2. Pengembangan Sistem pendiaan sumber data dan kajian kebijakan 3. Optimalisasi iptek untuk pembangunan 4. Pengembangan kawasan dan zona ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunya litbang • Terbangunnya tecknopark
5. Terkendali nya Laju Urbanisasi	1. Pengendalian laju urbanisasi	1. Membuka lapangan kerja di desa 2. Pembangunan agroindustri di desa	1. Membuka lapangan kerja di desa	1. Membuka lapangan kerja di desa dengan padat karya	2. Meningkatkan lapangan kerja di desa 3. Menumbuhkan sektor industri, perdagangan	1. Mengembangkan lapangan kerja di desa 2. Mengembangkan sektor industri, perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap desa memiliki BUMDES • 7 kawasan agroinsustri terbangun dan berkembang

Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Yang Berbasis Maritim Dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian	1. Pembangunan pariwisata berkelas dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kawasan kawasan potensial Pariwisata 2. Membangun pariwisata berbasis masyarakat 3. Pembangunan Pariwisata kelas duni melalui KEK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan wisata laut dan budaya 2. Pembangunan Kawasan potensial pariwisata 3. Pembangunan destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; 4. Pembangunan jalur transportasi ke daerah destinasi pariwisata 5. Menumbuhkan sektor industri, perdagangan dan jasa perhotelan untuk mendukung pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan wisata laut dan maangrove 2. Pengembangan kawasan potensi pariwisata 3. Peningkatan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; 4. Peningkatan jalur transportasi ke daerah destinasi pariwisata dan jasa perhotelan untuk mendukung pariwisata 6. Menyusun regulasi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemntapan regulasi Pariwisata 2. Pembangunan KEK pariwisata Pei-pe 3. Pembangunan wisata agropolitan 4. Pengembangan wisata laut dan mangrove 5. Pengembanganka wasan potensial pariwisata 6. Peningkatan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; 7. Peningkatan jalur transportasi ke daerah destinasi pariwisata 8. Menumbuhkan sektor industri, perdagangan dan jasa perhotelan untuk mendukung pariwisata 9. Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan KEK pariwisata 2. Peningkatan kualitas destinasi, sarana dan prasarana penunjang pariwisata; 3. Peningkatan jalur transportai ke daerah destinasi pariwisata 4. Pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa perhotelan untuk mendukung pariwisata 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan 6. Pemantapan kemitraan, promosi dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya KEK Pariwisata • Terciptanya 3 zona unggulan untuk pariwisata budaya, selancar dan konservasi di luar KEK • Menjadi kabupaten dengan pariwisata kelas dunia • Jumlah kunjungan pariwisata 300.000 orang per tahun • Kemandirian ekonomi 2025 • Daya beli meningkat menjadi Kabupaten berpendapatan menengah 300 US per

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
					<p>sumber daya manusia bidang kepariwisataan</p> <p>10. Pemantapan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata;</p>	<p>pariwisata;</p> <p>7. Menumbuhkan sektor industri, perdagangan dan jasa perhotelan untuk mendukung pariwisata</p> <p>8. Pembangunan sumber daya manusia bidang kepariwisataan</p> <p>9. Pemantapan kemitraan, promosi dan pemasaran pariwisata;</p>	<p>kepala tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD dari sektor pariwisata menyumbang 80% • Kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB 40%
	2. Pembangunan agroindustri dan agribisnis	1. Pembangunan agroindustri dan agribisnis terpadu berdasarkan keunggulan masing-masing pulau serta pemasaran hasilnya	1. Pembangunan sentra-sentra pertanian dari sistem kebudidaya	1. Peningkatan sentra-sentra pertanian	<p>1. Pembangunan dan peningkatan sentra-sentra pertanian unggulan dan terpadu</p> <p>2. Perbaikan dan penataan subsistem agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian</p> <p>3. Peningkatan kawasan</p>	<p>1. Pengembangan sentra-sentra pertanian unggulan dan terpadu (Kelapa, Cengkeh, Pala, Lada, Pinang Pisang dan keladi)</p> <p>2. Perbaikan dan penataan subsistem agribisnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kawasan agroindustri dan agribisnis terpadu 7 kawasan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
					<p>pertumbuhan agribisnis di perdesaan.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan</p> <p>5. Penguatan Penyuluhan Pertanian penerapan teknologi pertanian</p>	<p>untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian</p> <p>3. Pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan</p> <p>5. Penguatan Penyuluhan Pertanian penerapan teknologi pertanian</p> <p>6.</p>	
	3. Pembangunan perikanan dan kelautan	<p>1. Pengembangan kelautan dan perikanan terpadu melalui optimalisasi dan modernisasi pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan</p> <p>2. Membang</p>	<p>1. Pengembangan sentra budidaya perikanan</p> <p>2. Pengadaan peratan penangkapan dan fasilitas pendukungnya</p> <p>3. Pengembangan sistem penyuluhan;</p>	<p>1. Pengembangan armada penangkapan dan fasilitas pendukungnya</p> <p>2. Pengembangan budidaya perikanan;</p> <p>3. Pengembangan sistem</p>	<p>1. Menggerakkan produksi di sentra-sentra produksi unggulan kelautan dan perikanan</p> <p>2. Peningkatan sentra budidaya udang</p> <p>3. Pengembangan armada</p>	<p>1. Menggerakkan produksi di sentra-sentra produksi unggulan kelautan dan perikanan</p> <p>2. Pengembangan armada penangkapan dan fasilitas pendukungnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua terumbu karang dan penanaman hutan mangrove terdokumentasi dan terencana perawatannya • Dokumentasi jenis ikan

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
		un kelembagaan nelayan		penyuluhan; 4. Pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan	penangkapan dan fasilitas pendukungnya 4. Pengembangan budidaya perikanan sidat; 5. Pembangunan budidaya ikan bedeng 6. Pengembangan sistem penyuluhan; 7. Pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 8. Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan 9. Peningkatan produksi, penanganan, pengolahan dan peningkatan mutu produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan kelautan 10. emberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan	3. Pengembangan budidaya perikanan sidat; 4. Pengembangan sentra budidaya udang 5. Pengembangan budidaya ikan bedeng 6. Pengembangan sistem penyuluhan; 7. Pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan. 8. Pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan 9. Pengembangan produksi, penanganan, pengolahan dan peningkatan mutu produk dan jasa berbasis sumberdaya perikanan dan	langka dan budidaya penangkaranya

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
					pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	kelautan 10. emberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	
	4. Pembangunan industri berbasis rumah tangga	1. Memberikan permodalan dan pelatihan usaha	1. Pelatihan usaha berbasis rumah tangga	1. Memberikan permodalan dan Pelatihan usaha berbasis rumah tangga 2. Pembangunan industri berbasis kelapa 3. Pembangunan industri utk mengolah hasil hasil pertanian terutama pangan	1. Memberikan permodalan dan 2. Pelatihan usaha berbasis rumah tangga 3. Pengembangan industri berbasis kelapa 4. Pembangunan industri kerajinan tangan 5. Peningkatan pembangunan industri hasil pertanian pangan	1. Memberikan permodalan dan 2. Pelatihan usaha berbasis rumah tangga 3. Pengembangan industri berbasis kelapa 4. Pengembangan industri kerajinan tangan 5. Pengembangan industri yang mendukung pariwisata 6. Pengembangan industri hasil pertanian pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor perdagangan dan jasa/pariwisata 45 % pada PDRB
	5. Pengembangan UMKM,	1. Mendorong sektor informal	1. Mendorong sektor informal	1. Mendorong sektor	1. Peningkatan transformasi	1. Berkembangnya sektor formal	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 10 Koperasi

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
	koperasi, BUMD dan BUMDes	<p>ke sektor formal dengan kemudahan fasilitas perizinan</p> <p>2. Pembangunan BUMDes dan BUMD untuk sektor-sektor strategis</p> <p>3. Membangun jaringan pasar regional nasional dan internasional</p> <p>4. Mendorong penyediaan pembiayaan melalui pendirian bank/BPR di setiap kecamatan</p>	<p>ke sektor formal dengan kemudahan fasilitas perizinan</p>	<p>informal ke sektor formal dengan kemudahan fasilitas perizinan</p>	<p>sektor informal ke sektor formal dengan kemudahan fasilitas perizinan</p> <p>2. Pembangunan BUMDes dan BUMD untuk sektor-sektor strategis</p> <p>3. Membangun jaringan pasar regional nasional dan internasional</p> <p>4. Mendorong penyediaan pembiayaan melalui pendirian bank/BPR di setiap kecamatan</p>	<p>2. Pengembangan BUMDes dan BUMD untuk sektor-sektor strategis</p> <p>3. Pengembangan jaringan pasar regional nasional dan internasional</p> <p>4. Pengembangan sektor pembiayaan di setiap kecamatan</p>	<p>produksi yang Mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 UMKM terbina • BUMD mandiri • BUMDes setiap desa mandiri
2. Pembangunan kehutanan disertai dengan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari	<p>1. Pembentukan hutan adat dan hutan kemasyarakatan</p> <p>2. Pemanfaatan Hutan Mangrove untuk objek pariwisata dan penelitian</p>	<p>1. Penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p>2. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil kehutanan</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan</p>	<p>1. Penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p>2. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil kehutanan</p>	<p>1. Berkembangnya Penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan</p> <p>2. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil kehutanan</p> <p>3. Peningkatan</p>	<p>1. Pengembangan kelembagaan masyarakat sekitar hutan</p> <p>2. Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil kehutanan</p> <p>3. Pengembangan pemanfaatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Kelompok HKm terbina dengan komoditas kehutanan • Pengembangan hutan mangrove di sipora menjadi destinasi pariwisata

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			potensi lahan di sekitar hutan 4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	tambah hasil kehutanan 3. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan 4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	pemanfaatan potensi lahan di sekitar hutan 4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 5. Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan 6. Pemanfaatan fungsi hutan lindung yang terletak di dalam daerah	potensi lahan di sekitar hutan 4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 5. Peningkatan pemanfaatan usaha hasil hutan, wisata alam dan jasa lingkungan 6. Pemantapan Pemanfaatan fungsi hutan lindung yang terletak di daerah 7. Pengembangan kelompok HKM, Hutan adat	
	2. Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan	1. Koordinasi dan Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan	1. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan	1. Pengembangan Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan	1. Pemantapan Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan	Lestarinya hutan dan satwa endemik mentawai

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
				satwa endemik Mentawai dan ekosistem hutan			
3. Meningkatkan investasi daerah	1. Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitas kemudahan perizinan 2. Menyiapkan bank tanah 3. Memberikan insentif terhadap investor 	1. Penyusunan regulasi tentang investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan regulasi tentang investasi 2. Pelayanan Perizinan terhadap investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penerapan e-perizinan 2. Penyusunan Perizinan terpadu satu pintu 3. Pembebasan lahan untuk investor 4. Memberikan insentif terhadap investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan e-perizinan 2. Pengembangan Perizinan terpadu satu pintu 3. Pembebasan lahan untuk investor 4. Memberikan insentif terhadap investor 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi swasta 6 Triliun • Tanah terkonsolidasi 500 hektar sebagai bank tanah
	2. Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan alokasi APBD untuk belanja modal diatas 70 % 2. Membangun BLUD dan BUMD untuk sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar 	1. Peningkatan Program dan kegiatan yang berbasis layanan dasar	1. Peningkatan Program dan kegiatan yang berbasis layanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Program dan kegiatan yang berbasis layanan dasar 2. Membangun RSUD menjadi BLUD 3. Mengembangkan BUMD untuk sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Program dan kegiatan yang berbasis layanan dasar 2. Membangun RSUD menjadi BLUD 3. Mengembangkan BUMD untuk sektor-sektor strategis dan pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • RSUD dengan manajemen BLUD • PAM di produksi oleh dengan Perusda • BUMD dengan kapitalisasi asset 100 miliar

Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
			2005 - 2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
1. Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana	1. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan poros utama (trans Mentawai) 2. Pembangunan jalan lingkar di setiap pulau (lokal sekunder) 3. Pembangunan jalan ke pusat-pusat pertumbuhan 4. Pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan 5. Pembangunan bandara Peipei, Rokot, dan Minas 6. Pembangunan dan pengelolaan air baku 7. Pembangunan energi 8. Pembangunan telekomunikasi dan informatika 9. Pengembangan sistem moda transportasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; 2. Pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan kecamatan dengan kecamatan 3. Pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; 2. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan 3. Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; 2. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten 3. Peningkatan dan pemantapan infrastruktur perdesaan 4. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; 2. Pengembangan jalan MANTAP 3. Pemantapan infrastruktur perdesaan 4. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; 5. Pengembangan partisipasi masyarakat dan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh desa dapat di akses dengan jalan • Trans mentawai terbangun 60 % • Pelabuhan dan kapal perintis terkoneksi di tiga pulau utama • Bandara Rokot dapat didatangi oleh pesawat menengah • Bandara peipei menjadi bandara internasional • Irigasi terbangun untuk mengaliri sawah • Bendungan untuk irigasi terbangun 10 unit

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
		<p>lokal berbasis kepulauan</p> <p>10. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p>		<p>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi</p>	<p>5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi</p> <p>6. Pembangunan jalan poros utama (trans Mentawai) 297 km</p> <p>7. Pelabuhan penyeberangan laut Mabukku, Sagitci, Polaga, Subelen, labuan Bajau, sakaladhat</p> <p>8. Pembangunan bandara Pei-pei, Rokot, dan Minas</p> <p>9. Pembangunan jaringan irigasi 20.000 m</p> <p>10. Pelayaran antar pulau sampai ke pantai barat Simatalu</p> <p>11. Penutasan infrastruktur pada kawasan korban</p>	<p>6. Penyelesaian pembangunan jalan poros utama (trans Mentawai) 297 km</p> <p>7. Penyelesaian Pelabuhan penyeberangan laut Mabukku, Sagitci, Polaga, Subelen, labuan Bajau, sakaladhat</p> <p>8. Pengembangan bandara Pei-pei, Rokot, dan Minas</p> <p>9. Pengembangan jaringan irigasi</p> <p>10. Pemantapan sitim transportasi antar pulau sampai ke pantai barat Simatalu</p> <p>11. Pengembangan dan pemantapan Jaringan telekomunikas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan air baku terbangun 10 unit • Semua desa dapat dikases dengan jaringan telekomunikasi dan internet • Rasio elektrifikasi 60% • Kabupaten kepulauan Mentawai entas dari daerah tertinggal tahun 2020 • Abrasi pantai di daerah pesisir terkendali

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
					bencana tsunami 2010 12. Pembangunan Jaringan telekomunikasi di 10 kecamatan 13. Pembangunan pelabuhan khusus (pelabuhan marina) 14. Pembangunan terminal penumpang 15. Pembangunan jaringan SPBU di 5 lokasi	i di 10 kecamatan 12. Penyelesaian pelabuhan khusus (pelabuhan marina) 13. Pengembangan terminal penumpang 14. Pengembangan jaringan SPBU 15. Pemantapan jaringan listrik.	
	2. Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang saling menguntungkan melalui pengembangan wilayah	5. Pengembangan desa dan kota yang saling ketergantungan untuk menghilangkan terjadinya enclave	1. Pembangunan jalur desa-kecamatan 2. Pembangunan jalur antar desa	1. Pembangunan Jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis pada desa	1. Peningkatan Jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis pada desa, antar desa, dan antar desa-kecamatan-kota	1. Pengembangan Jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis pada desa, antar desa, dan antar desa-kecamatan-kota	Gini rasio dapat diturunkan dari 0,276 menjadi 0,23 pada tahun 2025
2. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Peningkatan Pendidikan dan layanan	1. Pendidikan gratis 9 tahun 2. Memberikan	1. Pemberian dana BOS untuk menaikkan akses	1. Memberikan beasiswa miskin	1. Pendidikan gratis 9 tahun 2. Memberikan	1. Pendidikan gratis 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tahun penurunan angka

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
	kesehatan bagi masyarakat miskin	<p>beasiswa miskin</p> <p>3. Memberikan jaminan kesehatan miskin</p> <p>4. Memberikan jaminan persalinan untuk masyarakat miskin</p>	<p>pendidikan</p> <p>2. Pemberian jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) untuk masyarakat miskin</p>	<p>2. Memberikan jaminan kesehatan miskin</p> <p>3. Memberikan jaminan persalinan untuk masyarakat miskin</p> <p>4. Akses pengembangan SDM keluarga melalui program inklusif ekonomi dan layanan dasar</p>	<p>beasiswa mahasiswa miskin</p> <p>3. Memberikan jaminan kesehatan miskin</p> <p>4. Memberikan jaminan persalinan untuk masyarakat miskin</p> <p>5. Akses pengembangan SDM keluarga melalui program inklusif ekonomi dan layanan</p>	<p>2. Memberikan beasiswa miskin bagi siswa dan mahasiswa</p> <p>3. Memberikan jaminan kesehatan miskin</p> <p>4. Memberikan jaminan persalinan untuk masyarakat miskin</p> <p>5. Akses pengembangan SDM keluarga melalui program inklusif ekonomi dan layanan</p>	<p>kemiskinan sebanyak 500 KK (selama 8 tahun pengurangan KK miskin = $8 \times 500 = 4000$ kk)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan angka kurang gizi untuk kelompok rumah tangga miskin menjadi 5 % pada tahun 2025 (pengurangan angka kurang gizi setiap tahun = 2,25%. Selama 8 tahun menurun dari 23 % angka kurang gizi menjadi 5 %)

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
	2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam usaha-usaha produktif 2. Memberikan akses permodalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dan memberdayakan rumah tangga miskin nelayan, petani dan pedagang informal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dan memberdayakan rumah tangga miskin nelayan, petani dan pedagang informal 2. Memberikan Akses pada kesempatan berusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan memberdayakan rumah tangga miskin nelayan, petani dan pedagang informal 2. Membangun Akses pada kesempatan berusaha dengan menggandeng mitra/CSR swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan memberdayakan rumah tangga miskin nelayan, petani dan pedagang informal 2. Meningkatkan Akses pada kesempatan berusaha dengan menggandeng mitra/CSR swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan 3 - 4 % rumah tangga miskin dan menyisakan seperempat kemiskinan pada tahun 2025 (pengurangan rmh tangga miskin setiap tahun 0,5%)
3. Terpenuhiya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	1. Penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan 2. Akses sanitasi dan air bersih 100 0 100 3. Memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 4. Menyiapkan KASIBA dan LISIBA 5. Mendorong pengembangan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan 2. Akses sanitasi dan air bersih 100 0 100 3. Memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 4. Menyiapkan KASIBA dan LISIBA 5. Mendorong pengembangan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan kumuh perkotaan dikendalikan 2. Akses sanitasi dan air bersih 100 0 100 3. Peningkatan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MBR 4. Menyiapkan KASIBA dan LISIBA 5. Mendorong pengembangan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pemukiman layak tahun 2025 • Semua kawasan memiliki RTH dan ramah anak • Akses sanitasi air bersih 100 0 100 • Tuapejat sebagai ibu kota kabupaten tertata dan maju menjadi

Tujuan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Tahapan Kebijakan				Kondisi Akhir (2025)
		mendapatkan akses pembiayaan 6. Membangun ruang terbuka hijau di setiap kawasan pemukiman			mendapatkan akses pembiayaan 6. Membangun ruang terbuka hijau di setiap kawasan pemukiman 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	mendapatkan akses pembiayaan 6. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan pemukiman 7. Pengembangan TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	green city • 70 % masyarakat miskin mendapatkan perumahan layak (setiap tahun 350 rmh x8 tahun = 2800 atau 70 % dari 4000 perumahan tidak layak))

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan Visi, Misi dan Program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Menjamin sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan di dukung oleh instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya
2. Bupati, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025 dengan segala potensi dan kemampuan daerah
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkewajiban wajib menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI